

Dr. Samsilayurni, M.Si.
Surismiati, S.Pd., M.Si.



Buku Ajar
**KEBIJAKAN
PENDIDIKAN**

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
<ol style="list-style-type: none"> 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kebijakan Pendidikan

Penulis : Dr. Samsilayurni, M.Si.
Surismiati, S.Pd., M.Si.

Editor : Dr. Samsilayurni, M.Si.
Surismiati, S.Pd., M.Si.
Eka H. Yuliany, S.Pd. M.Si.

Layout : Eka H. Yuliany, S.Pd. M.Si.

Desain Cover : Eka H. Yuliany, S.Pd. M.Si.

Hak Penerbit pada :

Dicetak oleh :

ISBN :

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1. Pentingnya Belajar Kebijakan Pendidikan	1
A. Latar Belakang Kebijakan Pendidikan	1
B. Pendidikan dengan Pendekatan Kajian Politik, Ekonomi dan Sosial	5
C. Pendidikan dan Kekuasaan Politik, Ekonomi dan Sosial	8
Rangkuman	12
Soal Latihan.....	13
BAB II Dasar Kebijakan Pendidikan.....	15
A. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan	15
Rangkuman	31
Soal Latihan.....	32
BAB III Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan	34
A. Definisi Formulasi Kebijakan Pendidikan	38
B. Faktor Yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan.....	38
C. Teori Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan	40
D. Pihak yang terlibat dalam Perumusan Formulasi Kebijakan Pendidikan	41
Rangkuman	51
Soal Latihan.....	53
BAB IV Birokrasi Dan Patologi Birokrasi	55
A. Pengertian Birokrasi Dan Patologi Birokrasi.....	55
B. Sistem Pendidikan dan Otonomi Pendidikan	59
C. Institusi Analisis Kebijakan Pendidikan.....	62
Rangkuman	65
Soal Pelatihan	66
BAB V Kebijakan pendidikan di Tingkatan Makro	68
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Nasional.....	68
B. Tahapan Kebijakan Pendidikan Nasional	69
C. Format dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional	71
Rangkuman	73

Soal Latihan.....	74
BAB VI Kebijakan Pendidikan Ditingkat Messo	76
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.....	76
B. Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota	79
C. Format Dan Implementasi Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.....	80
Rangkuman	82
BAB VII Kebijakan Pendidikan Di Tingkatan Mikro.....	86
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah	86
B. Konsep kebijakan Mikro pembangunan Pendidikan Nasional	86
C. Penerapan Sistem Pendidikan Secara Makro dan Meso di Tingkat Mikro	89
D. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Sekolah/Madrasah	91
Rangkuman	94
Soal Latihan.....	95
BAB VIII Pendidikan Karakter.....	98
A. Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter	98
Rangkuman	105
Soal Latihan.....	106
BAB IX Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi	108
Rangkuman	119
Soal Latihan.....	120
BAB X Analisis Kebijakan Pendidikan Vokasional	122
A. Pengertian Pendidikan Vokasional	122
B. Tujuan Pendidikan Vokasional.....	124
C. Perbedaan Vokasi dan Sarjana	126
D. Manfaat Pendidikan Vokasional	129
Rangkuman	131
Soal Latihan.....	133
BAB XI Analisis Kebijakan Kurikulum MBKM.....	135

A. Pengertian Kurikulum MBKM.....	135
Rangkuman	141
Soal Latihan.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

(Pertemuan 1 dan 2)

Pentingnya Belajar Kebijakan Pendidikan

A. Latar Belakang Kebijakan Pendidikan

Dengan adanya kemajuan zaman dan bertambah banyaknya Tingkat kelahiran sumberdaya manusia di muka bumi, sehingga lahirlah Kebijakan yang kompleksitas dengan kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap semua masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama. Kebijakan publik adalah sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah. maksudnya menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang sifatnya mengikat. Idealnya dalam proses pembuatan kebijakan merupakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang mutlak di ikuti oleh siapapun tanpa kecuali, kebijakan itu diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Kebijakan lahir karena ingin memberi aktifitas bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi ke generasi berikutnya agar tetap terpelihara, terjaga dan berkembang. Sehingga, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang pemerintah sebagai penguasa. Ini disebabkan semakin kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (sustainability) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintegrasi dan berkualitas.

Salah satu contoh bentuk kebijakan, khususnya kebijakan dibidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan sekolah gratis. Sekolah gratis yang penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan

operasional sekolah. Kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan di semua wilayah Indonesia ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun yang sudah diprogram oleh pemerintah berdasarkan UU Nomer 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pemerataan memperoleh kesempatan belajar, membantu meringankan biaya sekolah dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan untuk mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan.

1. Sejarah Kebijakan

Sejarah kebijakan sebagai suatu studi, baru dimulai tahun 1930-an di USA pada waktu New Deal mengundang keterlibatan para sarjana dan ahli ilmu pengetahuan untuk merumuskan kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah publik. Tahun 1937 universitas Harvard mengembangkan program pascasarjana dalam bidang administrasi negara yang salah satu konsentrasinya pada public policy. Saat itulah, kebijakan dikukuhkan sebagai disiplin ilmu dan menjadi titik tolak berkembangnya studi kebijakan dibidang ekonomi politik dan administrasi negara. Namun ruang lingkup, substansi, pendekatan, prosedur, metodologi dan manajemen operasionalnya belum menunjukkan "body of knowledge" yang mapan. Akhir tahun 1940-an dibentuk suatu panitia yang beranggotakan dosen-dosen kebijakan pada universitas di USA yang bertugas untuk mengembangkan materi ajar yang baik dan relevan bagi studi kebijakan dan administrasi negara. Sejak saat itu, penelitian dan studi kebijakan mulai bermunculan dan direspons oleh berbagai negara. Pada dunia pendidikan di Indonesia, kebijakan Pendidikan mulai terkenal tahun 1990-an dengan adanya program studi Administrasi Pendidikan.

2. Alasan Pentingnya Kebijakan Pendidikan

Banyak sekali alasan tentang pentingnya kebijakan Pendidikan, diantaranya adalah karena pendidikan merupakan hajat hidup orang banyak yang substansi dan penyelenggaraannya sangat beragam. Pendidikan sangat berkaitan dengan nilai-nilai seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku/ras, ekonomi, sosial budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan seperti penjelasan diatas. Tekait hajat hidup orang banyak yang nilainya sangat beragam, pendidikan dihadapkan dengan berbagai masalah yang muncul, baik masalah pertentangan atau konflik nilai-nilai maupun masalah penyelenggaraan dan kualitasnya.

Sudah hal yang lumrah bila satu penyelesaian yang parsial berpengaruh pada timbulnya masalah pada komponen lain. Begitu rumit dan kompleksnya memecahkan masalah pendidikan bila ditangani secara parsial dan oleh kalangan terbatas. Untuk itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai power untuk dipedomani agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan Masyarakat sesuai agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan kemajuan, dan kepentingan

pemerintah. Artinya kebijakan pendidikan haruslah memperhatikan berbagai dimensi dan persoalan-persoalan yang krusial darimasyarakat, pemerintah dan tuntutan jaman.

3. Tujuan Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan

Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam analisis kebijakan Pendidikan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan
- b. Membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan
- c. Memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan Pendidikan
- d. Membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan Pendidikan
- e. Membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang implementasi kebijakan Pendidikan
- f. membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluasi kebijakan Pendidikan
- g. Memfasilitasi mahasiswa menemukan dan menunjukkan berbagai kebijakan Pendidikan
- h. Mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan kebijakan Pendidikan

4. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran tentang kebijakan pendidikan, adalah:

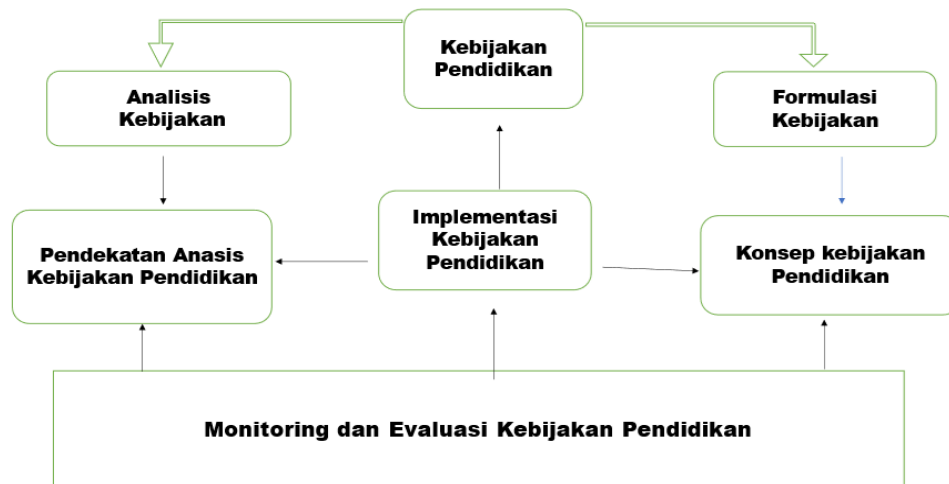
- a. Mahasiswa memahami pentingnya kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Indonesia
- b. Mahasiswa memahami konsep kebijakan pendidikan
- c. Mahasiswa memahami konsep analisis kebijakan
- d. Mahasiswa memahami perumusan dan pengesahan kebijakan pendidikan
- e. Mahasiswa memahami dan memiliki keterampilan komunikasi kebijakan pendidikan.
- f. Mahasiswa memahami konsep dan memiliki kemampuan mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan baik.
- g. Memahami pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan dan dapat menerapkannya dalam menganalisis kebijakan pendidikan.
- h. Mahasiswa menguasai dan memiliki kemampuan dalam proses analisis kebijakan pendidikan
- i. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan
- j. Mahasiswa memahami perkembangan histories kebijakan pendidikan di Indonesia
- k. Mahasiswa memahami kebijakan pokok pembangunan nasional.

5. Peta Konsep

Kajian dalam mata kuliah kebijakan pendidikan perlu digambarkan dalam bentuk bagan peta konsep sebagai berikut:



Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik dikaji dalam Studi kebijakan dapat digambarkan dalam peta konsep berikut:



B. Pendidikan dengan Pendekatan Kajian Politik, Ekonomi dan Sosial

1. Pendidikan dengan Pendekatan Kajian Politik

Menurut (Tusadia, dkk, 2023) setiap bangsa memiliki sistem sosial-politik, dan dua komponen kunci adalah politik dan pendidikan. Meski diposisikan sebagai dua komponen krusial dalam sistem sosial-politik, politik dan pendidikan seringkali dicermati secara terpisah. Ini jelas tidak benar karena politik dan pendidikan berjalan beriringan dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan. Ungkapan tersebut di atas membuktikan hubungan yang tampak kuat antara politik dan pendidikan dalam. Hal ini sejalan dengan pendapat (Asdrayany, dkk, 2023) yang menyatakan bahwa pendidikan dan politik memiliki hubungan yang sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara.

Berdasarkan sebuah pandangan politik, pengaruhnya politik dalam sistem pendidikan sesuai aturan Pasal 31 Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945, "Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% (ayat 4), dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5)", adapun keputusan dalam Undang-Undang Dasar

itulah selanjutnya ditindak lanjuti yang tertuang dalam perundangan Nomor 20 tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” yang merupakan hasil dari kemufakatan politik. Sedikitnya terdapat 5 dampak politik terhadap Pendidikan yaitu: “(a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan- harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial” (Susanto, 2018). Disisi lain menurut (Pristiwanti, 2022) setelah adanya penerapan otonomi Pendidikan, sebagai pertanggungjawaban terhadap otonomi daerah maka penanganan pendidikan bukan lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini kapasitas pemerintahan daerah yang berwenang baik dalam permasalahan tenaga pengajar ataupun sedikitnya biaya anggaran Pendidikan.

2. Pendidikan dengan Pendekatan Kajian Ekonomi

Berdasarkan pandangan ekonomi, pendidikan merupakan penanaman modal dalam bentuk tenaga kerja terdidik dan terlatih. Pendidikan adalah suatu elemen penting di dalam memajukan suatu kualitas tenaga kerja manusia, maka dari itu di perlukan dengan melalui pendidikan, psikomotor dan kognitif seseorang dapat menumbuhkan sebuah gagasan dan pada akhirnya bisa menciptakan dan meningkatkan sebuah produktivitas. Menurut (Widiansyah, 2017) pendidikan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth) dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan berkualitas. Pendidikan sangat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, hal ini telah menjadi sebuah justifikasi yang bersifat absolut dan aksiomatis. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. SDM yang berkualitas tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sebuah sistem pendidikan yang berkualitas pula. Dengan adanya pendidikan inilah bisa menghasilkan mutu dan tenaga kerja yang mungkin bisa lebih berpengalaman, baik itu pada unit bidang industri ataupun unit lainnya.

3. Pendidikan dengan Pendekatan Kajian Sosial

Menurut (Hidayatullah, 2019) adanya pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial, yang mana perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan- perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.

Sekolah berperan sebagai reproduksi budaya yang maksudnya menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Banyak orang menyebut bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan tentunya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan, begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan, utamanya, paradigma yang mendasarinya.

Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa menyebut perubahan sosial dan pendidikan yang transformatif ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarikan nafas: pendidikan transformatif adalah perubahan sosial dan perubahan sosial adalah pendidikan transformatif. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa perubahan sosial tentu membutuhkan aktor-aktor yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, komitmen, serta kesadaran akan diri dan posisi strukturalnya. Untuk itu perlu tersedianya suatu media dimana ide-ide, nilai- nilai maupun ideologi, yang tentunya kontra ideologi hegemonik, ditransmisikan kepada para pelaku perubahan sosial.

Dengan kesadaran sosial yang dibangun diatas basis relasi intersubjektif rakyat dapat memainkan peranan dalam rekonstruksi tatanan sosial baru yang lebih demokratis. Tatanan sosial yang demokratis ini menurutnya kondusif bagi humanisme dan pembebasan. Secara konseptual, ada tiga paradigma pendidikan yang dapat memberi peta pemahaman mengenai paradigma apa yang menjadi pijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berdampak sangat serius terhadap perubahan sosial. Pertama, paradigma konservatif. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa ketidaksederajatan masyarakat

merupakan suatu keharusan alami, mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Pada dasarnya masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya dia yang tahu makna dibalik itu semua.

Kedua, paradigma pendidikan Liberal. Kaum Liberal, mengakui bahwa memang ada masalah di masyarakat. Namun bagi mereka pendidikan sama sekali steril dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Tugas pendidikan cuma menyiapkan murid untuk masuk dalam sistem yang ada. Sistem diibaratkan sebuah tubuh manusia yang senantiasa berjalan harmonis dan penuh keteraturan (*functionalism structural*). Kalaupun terjadi distorsi maka yang perlu diperbaiki adalah individu yang menjadi bagian dari sistem dan bukan sistem Pendidikan dalam perspektif liberal menjadi sarana untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar stabil dan berfungsi secara baik dimasyarakat.

Ketiga, paradigma pendidikan kritis. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi kaum konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal ditujukan untuk perubahan moderat dan acapkali juga pro status quo, maka bagi penganut paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam tatanan politik ekonomi masyarakat dimana pendidikan berada. Dalam perspektif ini, pendidikan harus mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pendidik maupun peserta didik, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis diri dan struktur dunianya dalam rangka transformasi sosial.

C. Pendidikan dan Kekuasaan Politik, Ekonomi dan Sosial

Para penguasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan pendidikan, dan mereka bergantung pada lembaga pendidikan untuk mendukung mereka dalam mempertahankan dan mempertahankan posisi otoritas mereka. Menurut (Hizam, 2022) setidaknya ada empat masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan, yaitu.

1. Domestifikasi dan Stupidifikasi

Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah harus berjalan seiring dengan petunjuk dan arahan yang datang dari penguasa. Baik kepala sekolah, guru, maupun peserta didik harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan dengan maksud untuk menjinakkan individu yang berada di lingkungan sekolah untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dirumuskan. Proses pembelajaran seperti inilah yang disebut dengan domestifikasi atau penjinakkan. Dimana kreativitas manusia dibunuh dan menjadikan manusia mesin robot yang diprogram sesuai kemauan tuannya. Proses pembelajaran seperti ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan di luar pendidikan yang menjadikan siswa yang berpartisipasi menjadi budak dan alat penjajahan mental. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan yang mempunyai kekuasaan. Hasil dari proses semacam ini tidak memberikan kebebasan, melainkan kebodohan (stupidifikasi).

Pembodohan dalam dunia pendidikan juga dapat dilihat pada ijazah. Ijazah yang merupakan selembar kertas menjadi alat ukur keberhasilan individu, terlepas bagaimana cara individu memperoleh ijazah tersebut apakah melalui jerih payah dalam berpikir atau diperoleh secara legal. Disisi lain, penggunaan tes objektif yang mengharuskan peserta didik bermain teka-teki dengan menjawab beberapa pilihan yang tersedia yang pada kenyataannya tidak mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis.

2. Indoktrinasi

Tidak mengherankan apabila kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Semua aspek kurikulum sudah diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi yang telah dijelaskan di atas. Maka yang terjadi dalam proses pendidikan sebenarnya adalah suatu proses menstransmisikan ilmu pengetahuan secara paksa. Proses pendidikan seperti yang telah dijelaskan merupakan proses transmisi kebudayaan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manajemen pendidikan yang cocok dengan proses indoktrinasi tentunya haruslah terpusat dan mudah dikontrol. Seperti manajemen berdasarkan kontrol (management by control) dan manajemen yang berdasarkan tujuan (management by objective).

3. Demokrasi dalam Pendidikan

Demokrasi dalam pendidikan yang dimaksud adalah demokrasi yang menjadikan manusia yang lebih bebas. Melalui demokrasi melahirkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terbuka yang dihadapi kepada seseorang. Inilah yang disebut situasi-situasi problematis dan bukan penguasaan pengetahuan yang sudah dikunyah terlebih dahulu dari sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan tersebut dapat berupa petunjuk pemerintah melalui kurikulum yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh para pendidik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah terinci.

Penyusunan kurikulum kita di dewasa ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh negara, antara lain ialah menentukan standar- standar atau benchmarking dari proses pendidikan. Hal ini memang dapat dijustifikasi asal saja penentuan standar untuk mencapai kualitas bukan merupakan proses imposing dari atas. Idealnya manajemen pendidikan nasional berdasarkan kurikulum yang berisi pesan-pesan negara harus disepakati dengan melaksanakan manajemen yang bukan berdasarkan kontrol (*Management by Control*) dan juga tidak mencukupi melaksanakan manajemen berdasarkan tujuan (*Management by Objective*) karena tujuan itu sendiri didesentralisasikan kepada daerah-daerah yang cocok dengan kebutuhan daerah. Yang dibutuhkan dalam manajemen pendidikan dewasa ini adalah *management by vision*, yaitu yang menyatukan visi dari semua anggota masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Integrasi sosial

Integritas sosial ternyata tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan melalui kekuasaan dari atas. Desentralisasi dan otonomi pemerintahan, baik pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam pendidikan dan kebudayaan. Suatu sistem pendidikan yang uniform dan otoriter akan mematikan kemampuan untuk mengembangkan budaya lokal yang merupakan batu bata penyusunan budaya nasional. Pendekatan multikultural merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang pluralistik dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Disinilah letak perkerjaan rumah dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, yaitu untuk mengembangkan budaya lokal dengan menempatkan sumber kekuasaan di tingkat lokal dan kemudian dikembangkan untuk membangun solidaritas sosial pada tingkat bangsa.

Pendidikan sebagai motor dari perubahan sosial yang radikal, menyebabkan pendidikan jadi rebutan kekuasaan dalam masyarakat. Partai-partai politik menjadikan pendidikan sebagai program yang utama atau sebagai iming-iming utama untuk membujuk rakyat di dalam pemilihan umum atau sebagai sarana untuk melestarikan kekuasaan atau jabatan. Semua itu menunjukkan betapa pendidikan telah beralih dari domain personal ke domain publik. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas betapa pendidikan telah dijadikan kebijakan utama untuk kemajuan suatu bangsa. Hampir semua negara maju, ketika masih pada tahap seperti negara-negara berkembang dewasa ini, mempunyai misi yang jauh ke depan, mereka melihat peran pendidikan di dalam memantapkan kehidupan politiknya sejalan dengan perbaikan kehidupan ekonominya. Tidak mengheran sebagian negara-negara maju tersebut menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama di dalam pembangunannya atau di dalam menjaga kepemimpinan (kekuasannya) di dunia yang terbuka dewasa ini. Setiap negara mempunyai ideologi masing-masing sebagai platform untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari platform ini dijabarkan berbagai dalam berbagai jenis kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama itu.

Rangkuman

Sistem sosial dan politik, merupakan dua komponen kunci dalam Pendidikan, atau dengan kata lain hubungan yang sangat kuat antara politik dan pendidikan. Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Selain itu pendidikan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth) dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan berkualitas. Dengan pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial, dengan pendidikan mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pendidik maupun peserta didik, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas, kritis dalam rangka transformasi sosial. Para penguasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Pendidikan. Ada empat masalah yang erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan yaitu: 1). Domestifikasi Stupidifikasi, 2) Indoktrinasi, 3) Demokrasi dalam Pendidikan, 4) Integrasi sosial.

Soal Latihan

MC

Berikut ini dampak politik terhadap Pendidikan yaitu:

- Politik membuat suasana proses Pendidikan menjadi bervariasi
- Politik berpengaruh pada anggaran Pendidikan
- Politik dapat menjadi tolak ukur dalam kelembagaan Pendidikan
- Pendidikan akan menjadi lacer bila ada unsur politik

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan makna Pendidikan pada pendekatan ekonomi?

- Pendidikan bagian dari ekonomi
- Pendidikan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia
- Pendidikan dan mempunyai hubungan secara signifikan
- Pendidikan dan sektor ekonomi saling membutuhkan
- Menganggap penting ekonomi dalam pendidikan dan kehidupan

MC

Berikut ini pengaruh penguasa terhadap pengelola Pendidikan?

- Action Oriented (Tidak Menunda)
- Berpikir Rumit
- Selalu Mencari Peluang Baru
- Mengejar Peluang dengan Disiplin Tinggi
- Hanya mengambil Peluang Terbaik

MC

Berikut makna dari Domestifikasi dan Stupidifikasi dalam dunia pendidikan?

- Ijazah yang merupakan selembar kertas menjadi alat ukur keberhasilan individu
- Pembelajaran yang dilaksanakan disekolah didasarkan pada petunjuk dan arahan yang datang dari penguasa
- Pembelajaran dilaksanakan secara demokrasi.
- Dapat membangun kreativitas peserta didik
- Tidak ada keikutsertaan Penguasa dalam proses Pendidikan

MC

Makna Demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan?

- Tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pendidikan
- Penyusunan kurikulum berdasarkan standar sekolah masing-masing

- Penerapan proses pembelajaran berupa petunjuk pemerintah melalui kurikulum yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh para pendidik sesuai dengan petunjuk yang telah terinci
- Penyusunan kurikulum berpusat pada kekuasaan negara
- Semata-mata Pendidikan untuk kepentingan kelompok tertentu

BAB II

(Pertemuan 3 dan 4)

Dasar Kebijakan Pendidikan

A. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan suatu kegiatan politik yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah oleh organisasi, Lembaga maupun pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan sebuah Keputusan yang sesuai dengan tujuan. Menurut (Anisa Nuraida Rahmah, 2022) Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. Dilanjutkan oleh (Setiawan dkk., 2021) bahwa kebijakan pendidikan yang dilahirkan harus bersifat intredisipliner dan kontekstual. Untuk dapat melahirkan kebijakan pendidikan maka diperlukan analisis kebijakan pendidikan yang tepat. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan melalui pendeiatan ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode inguiri dan argument ganda. Kebijakan pendidikan hadir karena munculnya permasalahan-permasalahan pada dunia pendidikan yang terjadi karena terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016).

(Anisa Nuraida Rahmah, 2022) menyatakan bahwa Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari hari-hari yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kebijakan pengembangan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersigat netral dan objektif. Oleh karena itu para pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Maka dalam kebijakan pengembangan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersigat netral dan objektif. Oleh karena itu para pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

Menurut (Elwijaya dkk, 2021) Kebijakan Pendidikan memiliki fungsi yang menjadi sebuah pedoman dalam melakukan suatu Tindakan, mengelola kegiatan dalam lingkup pendidikan ataupun organisasi sekolah dengan Masyarakat serta pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan tujuan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam menentukan sebuah kebijakan pendidikan. berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Tujuan Kebijakan didasarkan pada tingkatan Masyarakat
- b) Tujuan kebijakan pendidikan didasarkan pada tingkatan politisi
- c) Tujuan pendidikan didasarkan pada tingkatan ekonomi

Fungsi Kebijakan Pendidikan Kaitannya dengan tujuan kebijakan pendidikan disini, Bahwasanya fungsi dari kebijakan pendidikan ini semata-mata dibuat guna menjadi sebuah pedoman di dalam melakukan suatu tindakan, mengelola kegiatan dalam pendidikan, organisasi ataupun sekolah dengan masyarakat serta pemerintah guna menggapai suatu target yang sudah ditentukan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan disini merupakan garis umum di dalam melakukan tindakan terhadap pengambilan suatu keputusan pada semua tingkatan pendidikan ataupun organisasi.

Tujuan Kebijakan Pendidikan

Menurut (Elwijaya dkk, 2021) Kebijakan Pendidikan erat hubungannya dengan tujuan pendidikan. Hadirnya tujuan pendidikan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas untuk dapat menentukan sebuah kebijakan pendidikan. Tak hanya tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan pun mempunyai tujuan agar lebih terstruktur serta terarah dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya dengan adanya sebuah tujuan tentunya akan memberi arah dalam hidup, dengan menetapkan

suatu tujuan maka bakal jelas pula target yang akan mau dicapai. Terdapatnya arah tujuan memungkinkan pikiran kita untuk fokus ketimbang melepaskan energi buat menggapai sesuatu yang abstrak. Ini sama halnya dengan kebijakan pendidikan yang mana perlu adanya sebuah tujuan, berkenaan dengan hal tersebut maka dijelaskan bahwasanya tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal diantaranya yakni:

1. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat

Kebijakan yang berdasar pada tingkatan masyarakat sendiri, dapat kita telusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Kemudian sebuah pendidikan disini mampu mengubah suatu individu jadi lebih baik sebelum dari yang sebelumnya. Selanjutnya dalam pendidikan sendiri dilatih pula nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, maka dari hal tersebut nantinya individu-individu ini memahami mana yang dianggap itu baik dan juga mana yang dianggap itu buruk. Maka dari sini dapat dikatakan bahwasanya pendidikan ialah suatu langkah menyempurnakan harkat serta martabat manusia yang diusahakan secara kontinyu.

2. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi

Dimana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politisi ini dapat kita telusuri dari kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Pendidikan disini menolong para peserta didik khususnya dalam membangun sikap serta ketrampilan kewarganegaraan yang positif guna membentuk warga negara yang benar serta bertanggung jawab. Orang yang terpelajar diharapkan lebih memahami wewenang serta peranannya agar nantinya pandangannya serta kepribadiannya kian demokratis. Disisi lain juga, orang yang terpelajar diharapkan juga mempunyai kesadaran serta tanggung jawab khususnya pada bangsa dan juga negara yang mana lebih baik daripada orang nan kurang terpelajar.

3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi

Bahwasanya tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan ekonomi ini bisa kita telusuri berdasarkan adanya sebuah pandangan berkaitan dengan esensial pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang mana bisa kita lihat alasannya seperti di bawah ini:

- a) Pendidikan merupakan suatu sarana untuk perkembangan ekonomi, pendidikan disini dapat menolong siswa dalam memperoleh ilmu serta ketrampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka terlihat bahwasanya semakin berpendidikannya seseorang, maka tingkatan penghasilan juga akan semakin baik, hal tersebut terjadi dikarenakan orang yang terpelajar jauh lebih produktif ketimbang orang yang kurang terpelajar.
- b) Investasi pendidikan disini tentunya akan memperoleh nilai balik nan lebih besardibanding investasi fisik dari bidang lain. Nilai balik pendidikan merupakantolak ukur antara jumlah anggaran nan dipakai buatmembiayai pendidikan berdasar padajumlah penghasilan yang hendak diterima nantinya selepas seseorang terjun di dunia kerja.

3. Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan

Menurut (Yuliah, 2020) dalam implementasi kebijakan pendidikan terdapat beberapa pendekatan, yaitu Top Down dan Bottom Up. Pendekatan Top Down yaitu pendekatan menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau makro. Pendekatan ini menjadikan pemerintah berperan beasar untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang bersifat top down ini bersifat secara strategis, umum dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya

Sedangkan pendekatan Bottom, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). kebijakan ini diawali dari masyarakat melalui aspirasi, permintaan dan dukungan dari masyarakat. implementasi kebijakan berusaha untuk menyampaikan harapannya dan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang berkenaan dengan bottom up biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyangkut masalah keamanan nasional, kebijakan ini berfokus kepada hal-hal seperti alat- alat kontrasepsi, padivarietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan lain sebagainya yang berfokus pada satu bidang yang menjadi masalah yang dihadapi.

Model Perumusan Kebijakan Pendidikan

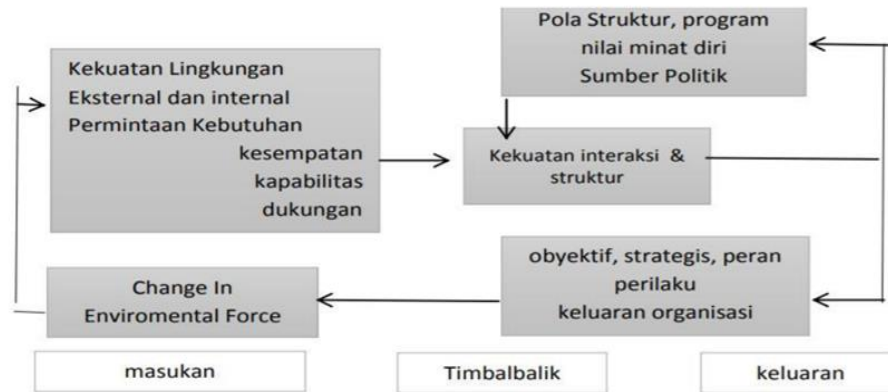
a) Model Kelembagaan (Institusionalisme)

Menurut (Sulton, 2020) Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi apapun yang telah dibuat pemerintah, dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan. Menurut Dye lembaga pemerintah memberikan kebijakan dengan tiga ciri utama yaitu (1) lembaga Negara itu memberikan pengesahan (legitimasi), (2) kebijakan Negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan, (3) hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada masyarakat (Dye 2011, 20). dengan demikian model kelembagaan ini merupakan model yang bisa diterapkan dalam membuat kebijakan pendidikan pada tataran pemerintahan.

b) Model Sistem

Paine dan Naumes menawarkan suatu model proses pembuatan kebijakan merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh David Easton. Model ini menurut Paine dan Naumes merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Menurut Paine dan Naumes, model ini disusun hanya dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang akan (1) menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal, (2) memuaskan permintaan lingkungan, dan (3) secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri. Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Easton, Paine dan Naumes menggambarkan model pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs) (Toha & Hilmy, 2020). Keluaran

yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Paine dan Naumes memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung pada proses pembuatan kebijakan sebagai berikut:



Sumber...

Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) sebagai sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik. Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hail kebijakan (kebijakankebijakan publik), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan, oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni: 1) menghasilkan output yang secara layak memuaskan, 2) menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas). -

c) Model Penyelidikan Campuran (Mixed Scanning)

Model yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni model sistem, model kelembagaan pada dasarnya mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, oleh karena itu, dalam rangka mencari model yang lebih komprehensif, Amitai Etzioni mencoba membuat gabungan dengan menyarankan penggunaan mixed scanning (Ismail & Sofwani, 2016). Pada dasarnya ia menyetujui model rasional, namun dalam beberapa hal ia juga mengkritiknya. Demikian juga, ia melihat pula kelemahan-kelemahan model pembuatan keputusan inkremental. Etzioni memperkenalkan mixed scanning sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan inkremental (Mulyana dkk., 2019), menetapkan proses-proses pembuat kebijakan pokok urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

Strategi penyelidikan campuran (mixed scanning strategy) menggunakan elemen-elemen dari dua pendekatan dengan menggunakan dua kamera, yakni sebuah kamera dengan sudut pandang lebar yang mencakup semua bagian luar angkasa, tetapi tidak terperinci dan kamera yang kedua membidik dengan tepat daerah-daerah yang diambil oleh kamera pertama untuk mendapatkan penyelidikan yang mendalam. Menurut Etzioni, daerah-daerah tertentu mungkin luput dari penyelidikan campuran ini, namun pendekatan ini masih lebih baik dibandingkan dengan inkrementalisme yang mungkin tidak dapat mengamati tempat-tempat yang kacau di daerah-daerah yang tidak dikenal. Dalam penyelidikan campuran para pembuat keputusan dapat memanfaatkan teori-teori rasional komprehensif dan inkremental dalam situasisituasi yang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin pendekatan inkrementalisme mungkin telah cukup memadai namun dalam situasi yang lain dimana masalah yang dihadapi berbeda, maka pendekatan yang lebih cermat dengan menggunakan rasional komprehensif mungkin jauh lebih memadai. Dengan demikian, model penyelidikan campuran ini merupakan model yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan yang berusaha untuk menetapkan berbagai keputusan secara rasional dan inkremental.

d) Model Proses

Model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatankegiatan secara berurutan: (1) identifikasi permasalahan, (2) menata agenda, (3) perumusan proposal kebijakn, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi kebijakan, (6) evaluasi kebijakan (Dye, 2011). Dengan demikian penulis berpendapat bahwa model proses harus senantiasa diterapkan dalam dunia pendidikan, agar kebijakan yang diberikan mengikuti alur yang ditetapkan dalam menghasilkan kebijakan yang baik dan tepat.

e) Model Teori Elite

Teori elite berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan (massa). Teori ini beranggapan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit. Dalam model elite lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elit dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan rakyat banyak (Masyitoh dkk., 2020), sehingga perubahan kebijakan publik hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai elite tersebut yang dilakukan oleh elite itu sendiri. Dalam model ini ada 3 lapisan kelompok sosial: 1. Lapisan atas, dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur. 2. Lapisan tengah adalah pejabat dan administrator. 3. Lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan dalam dunia pendidikan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi di antara elit politik sendiri. Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas, sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Untuk itu perlu adanya

sikap bijak dalam menentukan kebijakan agar dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umum.

f) Model Rasional

Mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai perolehan sosial maksimum (maximum social gain) yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model rasional memberikan preskripsi berbagai prosedur pengambilan keputusan yang akan menghasilkan pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan. Teori-teori rasionalis berakar dalam aliran-aliran pemikiran positivisme dan rasionalisme jaman pencerahan yang berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan kondisi hidup manusia. Ide-ide ini didasarkan pada keyakinan bahwa berbagai permasalahan sosial seharusnya diselesaikan melalui cara yang ilmiah dan rasional, melalui pengumpulan segala informasi yang relevan dan berbagai alternatif solusi, dan kemudian memilih alternatif yang dianggap terbaik. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa model rasional menyimpulkan bahwa berbagai keputusan publik pada prakteknya tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, tetapi hanya cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan untuk diri mereka sendiri dalam masalah yang sedang menjadi perhatian sebagai sesuatu yang muncul dari hakekat rasionalitas manusia yang terbatas.

g) Model Inkrementalis

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Model inkrementalis berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak cukup waktu, intelektual, maupun biaya ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Model ini mencoba untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan pada pluralitas dan demokrasi, maupun keterbatasan-keterbatasan kemampuan manusia (Dye, 2011). Landasan pokok rasional model ini adalah bahwa perubahan inkremental memberikan tingkat maksimal keamanan dalam proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan yang bisa dipercaya didasarkan pada acara satu-

satunya untuk mengambil keputusan tanpa menimbulkan resiko dengan melanjutkan kebijakan sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama membatasi pertimbangan-pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakankebijakan yang secara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecil dengan kebijakan sekarang yang berlaku. Dengan demikian, model kebijakan ini merupakan model yang tidak melakukan proses, sementara pendidikan memerlukan proses yang sangat lama dan berkelanjutan, jadi hemat peneliti model ini kurang tepat diterapkan dalam dunia pendidikan.

h) Model Strategis

Disebut strategis adalah intinya pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya) apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada identifikasi dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, model strategis merupakan sebuah model yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, karena pada hakikatnya kebijakan yang dibuat harus berdasar pada alternatif pemecahan masalah yang terjadi dilapangan, sehingga ketepatan strategi dapat membawa perbaikan di kemudian hari.

i) Model Deliberatif

Pada intinya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna (Beneficiaries atau consumer dalam konsep ekonomi). Dengan demikian, proses formulasi kebijakan publik melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihanpilihannya kepada pemerintah sebelum pengambilan keputusan (Parsons, 2006). Proses analisis kebijakan publik model “musyawarah” ini jauh

berbeda dengan model-model teknokratik karena peran analisis kebijakan hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Model deliberatif ini juga dikenal sebagai model kebijakan argumentatif, yang merupakan model perumusan kebijakan dengan melibatkan argumentasi-argumentasi dari pihak, atau dengan mempelajari argumentasi-argumentasi tertulis dari berbagai pihak, sebagai dasar perumusan. Model argumentatif atau deliberatif dikembangkan dari keyakinan kaum Shopia di Yunani Kuno yang menyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pihak. Di dalam model deliberatif dibutuhkan peran dari publik, tanpa publik proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis, maka penulis berpendapat bahwa model deliberatif merupakan model yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam menentapkan serta merumuskan kebijakan yang tepat dengan melibatkan stakeholder yang ada dalam dunia pendidikan.

j) Model Analisis Kebijakan Pendidikan

William Dunn, sebagaimana Nanang Fatah membuat satu pengertian tentang analisis kebijakan dengan menyatakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan melalui metode inkuiri dan argumentasi berganda dalam rangka menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan sesuai dengan suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis, sehingga mampu memecahkan masalah dalam kebijakan (Khoiruddin, 2016) Kegiatan analisis digunakan untuk melibatkan pemahaman dasar bagi manusia dalam upaya pemecahan masalah secara praktis. Tidak lagi hanya sebuah argumentasi sekedar rasional.

Ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan menurut Dunn, yaitu model prospektif, retrospektif dan integratif. Model prospektif, yaitu model analisis kebijakan yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diterapkan. Atas pengertian tersebut, maka model ini lalu diidentikkan dengan model prediktif, atau dalam bahasa lain disebut dengan ramalan (forecasting). Karena sifatnya sebagai ramalan maka model melakukan prediktif kemungkinankemungkinan penerapan kebijakan yang akan diusulkan. Sedangkan model retrospektif, yaitu kebalikan dari model prospektif, bagaimana setelah kebijakan itu dilaksanakan. Model ini sering dinamakan model

analisis evaluatif, menganalisa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Adapun model integratif, yaitu memadukan kedua model di atas (Khoiruddin, 2016).. Model ini juga dinamakan dengan model analisis komprehensif atau holistic, karena analisisnya dilakukan atas konsekuensi sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model ini biasanya menggunakan teknik ramalan dan evaluasi secara integrative. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, kurikulum madrasah juga mendapat tantangan yang sangat berat. Apabila tidak melakukan reformulasi terhadap kurikulum pendidikan madrasah yang ada, maka keberadaan madrasah lambat laun akan ketinggalan, yang pada gilirannya ditinggalkan umat sebagai peminat pendidikan madrasah.

Pendidikan Islam sebenarnya telah berlangsung selama berabad-abad yang merupakan tradisi pembelajaran Islam sebagai sebuah akar. Bahkan pendidikan pesantren yang kemudian ada sistem madrasah telah banyak diakui sebagai karakteristik pendidikan asli Indonesia. Modernisasi madrasah dimulai sejak kedatangan penjajah dari bangsa Eropa, Belanda khususnya yang menerapkan sistem pendidikan klasikal, sebagian orang mengatakan pendidikan berbasis sekuler. Pendidikan pesantren dengan kurikulum pembelajarannya ilmuilmu naqliyah seperti al- qur'an, hadist, ilmu-ilmu tauhid, fiqh dan sejarah Nabi Muhammad serta mantiq yang dipelajari secara tradisional, dan dilakukan seadanya. Sistem hafalan menjadi primadona pembelajaran hampir semua pesantren, yang didalamnya tentu madrasah telah berjalan sejak pesantren itu ada hingga hari ini (Khoiruddin, 2016), maka penulis mengambil kesimpulan bahwa model analisis kebijakan pendidikan yang terjadi saat ini memadukan analisis prospektif, retrospektif dan integratif. Karena kebijakan dalam dunia pendidikan merupakan kebijakan serius untuk membangun perbaikan dalam dunia pendidikan secara komprehensif dan integratif.

k) Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012) adalah dijelaskan adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: "pendekatan top down dan bottom up. Istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando,

yang mirip dengan top down approach)” dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Bintari & Pandiangan, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan implementasi kebijakan, kemudian keputusannya diambil dari tingkat pusat. Implementasi kebijakan dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional. Menurut Smith dalam Islamy (2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan adalah dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (Meilina dkk., 2019). Dengan demikian, anggapan penulis berkenaan dengan penggunaan model implementasi kebijakan ini harus disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan yang hendak dicapai dan kedua pendekatan ini dalam di aplikasikan dalam dunia pendidikan.

h) Analisis Model Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan. Diantara istilah itu adalah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education). Beberapa istilah di atas memiliki perbedaan dan penggunaan yang berbeda pula (Azis, 2017).

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan (Sabri, 2013). Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumber daya manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan (Muhi dkk., 2017). Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk

melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural (Munadi & Barnawi, 2011). Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk proses kebijakan.

Sementara itu kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Yoyon yaitu lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan politik yang didasarkan pada asumsi-asumsi politis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, ketidakjelasan dalam asumsi-asumsi yang digunakan terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan. Kompleksitas dan heterogenitas, sifat dan situasi yang disebut sekolah selalu diidentikan dengan pendidikan. Sehingga tidak heran manakala membicarakan sistem pendidikan ternyata yang dibahas adalah sistem persekolahan.

Kebijakan dalam pendidikan pun tidak terlepas dari nilai-nilai yang harus melekat pada seorang pembuat kebijakan, di antara nilai-nilai tersebut James Anderson menjabarkannya menjadi lima nilai yakni nilai politik, nilai organisasi, nilai partai, nilai kebijakan, dan nilai ideologi. Kelima nilai ini akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh akan bisa dilihat pada sisi evaluasi kebijakan (Dewi, 2017). Evaluasi dengan menggunakan sistem sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain (Winarno, 2012). Menganalisis kebijakan pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan penyelenggaraan persekolahan. Akibatnya paradigma pendidikan yang universal dipandang secara sempit dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Kemudian dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara empirikal, evaluative, normative, predictive yang memberikan pedoman jelas bagi pengejawentahan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara “sinergi” bukan sebagai komponen yang “terdikotomi”. Artinya

apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria kebijakan yang utuh atau masih ada butir-butir yang lepas dari ruang lingkungannya (Irianto, 2011; Saihu, 2020). Berkaitan dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak semua kebijakan pendidikan didasari oleh asumsi-asumsi politis, banyak pula kebijakan pendidikan yang diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi di lapangan. Untuk itu perlu strategi yang tepat dalam memetakan permasalahan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.

4. Tahapan kebijakan pendidikan

Menurut (Oktavia dkk., 2021) dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun kebijakan analisis proses tersebut yaitu:

- **Inisiasi**

Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Pada tahap ini belum ada tuntutan untuk dapat merumuskan permasalahan namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini perlu untuk dirumuskan. Pada tahap ini juga dilakukan proses inovasi dalam melakukan konseptualisasi umum dan membuat kerangka permasalahan secara umum. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat dikembangkan.

- **Estimasi**

Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah di fokuskan dengan

menggunakan metode olian yang bersifat proyektif dan empiris agar dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih. Pengkajian juga difokuskan pada evaluasi terhadap luaran yang akan dihasilkan melalui pendekatan teknis lainnya.

- **Seleksi**

Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa pertimbangan dan penilaian kebijakan maka diperlukanlah pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan sering kali dilahirkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis namun adanya aspek lain yang perlu diperhatikan seperti keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang berbeda mengenai pandangan ideologi, moral dan kerangka acuan.

- **Implementasi**

Tahapan implementasi merupakan tahapan pelaksanaan pilihan yang telah disepakati. Tahapan implementasi merupakan sarana untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata. Pada tahapan sebelumnya kebijakan masih dalam bentuk pemikiran sedangkan pada tahapan implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan secara nyata.

- **Evaluasi**

Pada tahapan inisiasi dan estimasi, sifat tahapan bersifat antisipatif sedangkan pada tahapan seleksi lebih bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bersifat transformasi ke dalam dunia nyata sedangkan pada tahapan evaluasi lebih bersifat retrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan.

- **Terminasi**

Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Proses kebijakan ini melibatkan berbagai individu, kelompok dan masyarakat dengan psikologi dan lingkungan yang berbeda-beda.

Rangkuman

Kebijakan merupakan suatu kegiatan politik yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah oleh organisasi, Lembaga maupun pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan sebuah Keputusan yang sesuai dengan tujuan, atau dapat juga di maknai sebagai Kebijakan pendidikan merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen-komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan. fungsi yang menjadi sebuah pedoman dalam melakukan suatu Tindakan, mengelola kegiatan dalam lingkup pendidikan ataupun organisasi sekolah dengan Masyarakat serta pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu: (a) Tujuan Kebijakan didasarkan pada tingkatan Masyarakat, (b) Tujuan kebijakan pendidikan didasarkan pada tingkatan politisi, (c) Tujuan pendidikan didasarkan pada tingkatan ekonomi. Kemudian pada proses kebijakan Pendidikan ada beberapa model dan pendekatan diantaranya; Model Kelembagaan (Institusionalisme), Model Sistem, Model Penyelidikan Campuran (Mixed Scanning), Model Proses, Model Teori Elite, Model Rasional, Model Inkrementalis, Model Strategis, Model Deliberatif, Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Adapun Tahapan kebijakan pada proses analisis seperti; Inisiasi, Estimasi, Seleksi, Implementasi, Evaluasi, dan Terminasi.

Soal Latihan

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan makna dari Kebijakan Pendidikan?

- Merupakan hasil akhir dari sebuah keputusan dibidang pendidikan yang diambil dengan memperhatikan komponen pendidikan dan komponen sosial yang berkaitan.
- Tidak didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian
- Dilakukan secara sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana
- Hanya sekedar melahirkan keputusan
- Dibangun secara cepat untuk memecahkan permasalahan pendidikan

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan makna fungsi kebijakan pendidikan? memberikan arah yang jelas

- Menjadi sebuah pedoman dalam melakukan suatu Tindakan terutama dalam mengelola kegiatan di lingkup pendidikan ataupun organisasi sekolah dengan Masyarakat.
- Kebijakan pendidikan didasarkan pada tingkatan politisi
- Peduli kerugian pihak lain
- Menganggap penting pendidikan dan kehidupan sehari-hari

MC

Berikut ini yang bukan merupakan Tujuan kebijakan pendidikan?

- Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat
- Merupakan suatu sarana untuk perkembangan ekonomi
- Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi
- Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi

MC

Berikut makna dari Model Kelembagaan dalam kebijakan pendidikan?

- Model yang bisa diterapkan dalam membuat kebijakan Pendidikan.
- Model di dasarkan kepada fungsi-fungsinya.
- Kebijakan negara yang dapat disebarluaskan.
- Tugas merumuskan kebijakan publik adalah tugas pemerintah
- Memuaskan permintaan lingkungan

MC

Berikut ini yang bukan merupakan tahapan proses analisis kebijakan pendidikan?

- Inisiasi

- Estimasi
- Planning
- Seleksi
- Implementasi

BAB III

(Pertemuan 5)

Tahapan Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Perumusan masalah kebijakan, menurut *Weimer dan Vinning* (2005) *problem analysis consists of the major steps*: 1) *Understanding the problem*; adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui: menerima masalah (analisis gejala), memilih masalah (analisis kegagalan), memodelkan masalah (identifikasi variabel kebijakan), 2) *choosing and explaining relevant policy goal and constraints*, adalah melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap, 3) *choosing a solution method* yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Terpenuhinya semua tahapan ini, para analisis bisa melakukan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya (Namora & Bakar, 2021).

Selanjutnya setelah perumusan masalah kebijakan selesai, dilanjutkan perumusan kebijakan. Lindblom (1980) dalam bukunya *The Policy-Making Process* mengemukakan lima tahapan untuk mempelajari perumusan kebijakan pendidikan, antara lain:

1. Pelajari bagaimana masalah pendidikan itu timbul dan masuk ke dalam agenda acara para pembuat kebijakan pemerintah,
2. Pelajari bagaimana khalayak merumuskan masalah pendidikan tersebut untuk pembuatan suatu tindakan,
3. Pelajari sikap apa yang diambil oleh anggota legislatif atau lembaga lainnya atas kebijakan pendidikan itu,
4. Pelajari bagaimana para pemimpin merapatkan kebijakan pendidikan itu
5. Pelajari bagaimana kebijakan pendidikan itu dievaluasi. Begitu juga dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, antara lain
 - a). Penyusunan agenda pendidikan,
 - b). Formulasi kebijakan pendidikan,

- c). Adopsi kebijakan pendidikan,
- d). Implementasi kebijakan pendidikan, dan
- e). Evaluasi kebijakan pendidikan. (Lindblom, ce, 1980)

a. Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lepas dari peran para aktor yang merumuskannya. Kajian terhadap aktor perumus kebijakan pendidikan merupakan hal yang menarik. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan mewarnai dinamika tahapan dan proses perumusan kebijakan. Adapun Aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari individu, kelompok, dan para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai satu kesatuan sistem kebijakan pendidikan.

Lester dan Stewart (2000) menyatakan bahwa para aktor perumus kebijakan dari pemerintah terdiri dari Birokrat Karier, Kantor Kepresidenan dan Kementerian, Lembaga Legislatif dan kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik, misalnya partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serikat guru, asosiasi penyelenggara pendidikan tertentu, asosiasi peserta didik, asosiasi pimpinan perguruan tinggi, asosiasi orang tua peserta didik serta individu masyarakat. Mereka ini sering kali disebut sebagai peserta dari non-pemerintahan (*non governmenta participants*). Peranannya dalam mensuplai informasi; memberikan tekanan (*pressures*); serta untuk mempengaruhi (Maskuri, 2017).

Sub-sistem dalam perumusan kebijakan pendidikan terbentuk tatkala semua pihak antara lain pemimpin dan yang dipimpin, kelompok politik, masyarakat dan pihak swasta yang berpartisipasi, sehingga terjadi interaksi antara partisipan atau para aktor kebijakan saling mempengaruhi membentuk suatu parameter-parameter yang relatif stabil. Parameter itu dibatasi oleh sistem nilai ataupun faktor internal dan eksternal para aktor. Perubahan interaksi antar aktor juga disebabkan oleh perubahan sistem nilai tentunya akan berakibat pada perubahan sub-sistem kebijakan yang dihasilkan.

b. Mengadakan Tahapan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan

Ada beberapa tahapan-tahapan yang diperlukan diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut ke masyarakat (*public*) termasuk di bidang pendidikan, yaitu: 1) tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap

meniru (*play stage*), dan 3) tahap tindakan (*game stage*). Dari tahapan-tahapan sosialisasi kebijakan publik ini, kita bisa mengukur suatu keberhasilan suatu sosialisasi kebijakan, dilihat dari indikator pencapaian masing-masing tahapan sebagai berikut.

c. Tahapan Persiapan (Preparatory Stage)

Dalam tahap ini, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut, sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut.

d. Tahapan Meniru (Play Stage)

Pada tahap meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan.

e. Tahap Siap Bertindak (Game Stage)

Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini masing-masing orang merasa puas, mereka saling memberi tahu koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya (*awardness*).

Strategi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Melalui Media Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. Ada beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kondisi unit kerja dan lingkungan masyarakat yang akan diberikan informasi sebagai berikut: 1) mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung, misalnya Mendikbud mensosialisasikan peraturan atau

kebijakan pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018, semua pimpinan sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut, mulai dari Menteri sampai pimpinan dibawahnya, 2) memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan, menjelaskan serta arti penting kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektifitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan, 3) menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar workshop, atau bimbingan teknis, 4) menyediakan berbagai media sosialisasi, seperti buku, poster, brosur, leaflet, CD, dan sebagainya, serta menyebarkan informasi tersebut media ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi, 5) membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman dan menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan, 6) menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan 7) menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan, 8) menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan (Arwildayanto dkk., 2018).

Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (compact disk atau DVD), internet, radio dan televisi.

Dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, poster dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, antara lain untuk mencapai tujuan: 1) memperkenalkan rangkaian kebijakan dan manfaatnya, 2) memperkenalkan prosedur terkait dengan kebijakan tersebut; 3) memberikan penawaran tertentu, seperti beasiswa serta prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 4) membentuk sikap atau pandangan (propaganda) tertentu, seperti budaya kerja baru yang melekat pada kebijakan tersebut (Arwildayanto dkk, 2018).

Sesuai dinamika perkembangan teknologi dibidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif serta ekonomis dilakukan melalui media sosial, misalnya facebook, twitter, instagram, whatsapp group, line dan lain-lainnya. Bahkan secara massal bisa dilakukan melalui media TV, Koran, radio, Sedangkan melalui

pertemuan tatap muka bisa di lakukan melalui Forum Diskusi Group (FGD), rapat sosialisasi, rapat pimpinan dan liannya yang dianggap forum sosialisasi kebijakan pendidikan.

II. Formulasi Kebijakan Pendidikan

A. Definisi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Menurut (Rahman dkk., 2022) Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu serya mencari peluang-peluang untu mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I dijelaskan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Faktor Yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Menurut (Rahman dkk., 2022) Dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya tidak ditetapkan begitu saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan iklim masyarakat suatu bangsa. Dengan harapan formulasi telah disusun sedemikian rupa dan kompleks tersebut dapat

benar-benar berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa yang unggul dan mampu bersaing secara global. Adapaun faktor-faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “rationale comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya

kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan.

C. Teori Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Menurut (Rahman dkk., 2022) Ada banyak teori atau pendekatan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan, namun dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa teori saja. Berikut teori dalam formulasi kebijakan pendidikan.

1. Teori inkrementalis, teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis.
2. Teori demokratis, teori ini implementasinya pada *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.
3. Teori Strategis, Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.
4. Teori pilihan publik, teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang

yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

5. Teori sistem, formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (output) dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput dan output. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.

D. Pihak yang terlibat dalam Perumusan Formulasi Kebijakan Pendidikan

Menurut (Rahman dkk., 2022) Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (policy maker). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

2. Eksekutif

Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan

jabaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor.

3. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.

4. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.

5. Interest Group (kelompok berkepentingan)

Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

6. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam

perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.

7. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

8. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.

III. Legimitasi/implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan inptimalisasinya maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.

Charles O Jones menyatakan tiga tahapan utama, yakni *organization, interpretation, and application*. pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya yang ada, unit-unit serta metode untuk

menjalankan program yang sudah direncanakan. kedua, interpretasi, yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarahannya kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. ketiga, aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut (Oktavia dkk., 2021) pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralisasi di Indonesia memungkinkan terjadinya perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan unsur pemerintah daerah. Dalam proses pendidikan diberikannya kesempatan dan wewenang kepada stakeholder pendidikan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan lembaga pendidikan (sekolah).

Praktek kebijakan pendidikan dituangkan dalam sebuah pengelolaan yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) (Athiyah, 2019). Pada sistem MBS ini terjadinya penyerahan wewenang pengelolaan sekolah kepada sekolah dan stakeholder yang terkait, (Ismali, 2018). Maka perlu diketahuinya strategi pengelolaan pendidikan di sekolah secara merata meskipun konsep pengelolannya bersifat desentralisasi. Adapun tahapan tersebut yaitu (Huda et al, 2020):

➤ Tahap Sosialisasi

Tahapan sosialisasi merupakan tahap yang penting karena diperlukannya penyebaran kebijakan yang merata kesetiap daerah yang ada di Indonesia. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Adapun yang menjadi tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Maka dalam memaksimalkan perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan

dengan memperhatikan aspek tujuan, manusia, lingkungan, proses, hasil dan kebiasaan.

➤ **Tahap Piloting**

Tahapan piloting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga diperlukan model uji coba. Model uji coba ini harus memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas dan sustainabilitas.

➤ **Tahap Diseminasi**

Tahapan diseminasi merupakan tahapan penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwa tahapan diseminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan anggaran yang besar. Ketiga tahapan ini perlu dikembangkan agar kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

IV. Evaluasi kebijakan pendidikan

Menurut (Nasih dkk., 2022) bahwa Kaufman dan Thomas telah mengemukakan ada delapan Model monitoring dan Evaluasi Program seperti berikut ini

a. *Goal-oriented Evaluation Model* (Model Evaluasi berorientasi Tujuan),

Adalah model evaluasi yang paling awal, dikembangkan mulai tahun 1961, memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan "sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikator pencapaian tujuan ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektivitas PBM, kualitas layanan prima.

b. *Goal-free Evaluation Model* (Model Evaluasi Bebas Tujuan),

Adalah evaluasi yang tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stake holder, dewan pendidikan, masyarakat. Evaluasi ini, terfokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan cost benefit analysis.

c. *Formatif-summatif Evaluation Model*

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:

1).Evaluasi *formatif*,

Bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan (*in-progress*). Monitoring dan supervisi, termasuk dalam kategori evaluasi *formatif*, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung, dan akan menjawab berbagai pertanyaan:

- a).Apakah program berjalan sesuai rencana?
- b).Apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing?
- c).Jika tidak apakah perlu revisi, modifikasi?

2).Evaluasi *sumatif*, dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi akan dapat menjawab pertanyaan:

- a).Sejauh mana tujuan program tercapai?
- b).Perubahan apa yang terjadi setelah program selesai
- c).Apakah program telah dapat menyelesaikan masalah?
- d).Perubahan perilaku apa yang dapat ditampilkan, dilihat dan dirasakan setelah selesai mengikuti pelatihan?

d. *Countenance Evaluation Model* (Model Evaluasi)

Evaluasi memfokuskan pada program pendidikan, untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model ini ada 3 tahapan program, yaitu:

1).*Antecedent phase*, pada tahap sebelum program dilaksanakan. Evaluasi akan melihat kondisi awal program, faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan/kegagalan, kesiapan siswa, guru, staf administrasi, dan fasilitas sebelum program dilaksanakan

- 2). *Transaction phase*, pada saat program diimplementasikan. Evaluasi difokuskan untuk melihat program berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, bagaimana partisipasi masyarakat, keterbukaan, kemandirian kepala sekolah,
 - 3). *Outcomes phase*, pada akhir program untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai akibat program yang telah dilakukan.
 - a). Apakah para pelaksana menunjukkan perilaku baik, kinerja tinggi?
 - b). Apakah klien (konsumen) merasa puas dengan program yang dilaksanakan?
 - c). Perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah program selesai?
- e. *Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)*

Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personel, perubahan perilaku (behavior change). Evaluasi model ini sesuai untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Evaluasi focus pada reaksi berbagai pihak atas program yang diimplementasikan, dan mengamati dampak akibat dari hasil pelaksanaan program.

f. *CIPP Evaluation Model (Model Evaluasi CIPP)*

CIPP singkatan dari Context, Input, Process, Product, adalah model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Menurut Stufflebeam, "Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging alternative decision making". Stufflebeam menggolongkan evaluasi menjadi empat jenis ditinjau dari alternatif keputusan yang diambil dan tahapan program yang dievaluasi. Dari empat tahapan evaluasi tersebut, setiap tahapan evaluasi adanya informasi pembuatan keputusan:

1) Evaluasi Context,

Dilakukan pada tahap penjajagan menghasilkan informasi untuk keputusan perencanaan (planning decision). Evaluasi konteks akan melihat bagaimana kondisi kontekstual, apa harapan masyarakat, apa visi dan misi lembaga yang akan dievaluasi.

2) Evaluasi Input,

Dilakukan pada tahap awal menghasilkan informasi untuk keputusan penentuan strategi pelaksanaan program (*structuring decision*). Evaluasi input akan melihat bagaimana kondisi input (masukan) baik raw input maupun instrumental input. Raw input adalah input yang diproses menjadi output, untuk lembaga pendidikan adalah siswa, peserta didik; Instrumental input seperti guru, fasilitas, kurikulum, manajemen, adalah input pendukung dalam implementasi program.

3) Evaluasi Process,

Dilakukan selama program berjalan menghasilkan informasi tentang pelaksanaan program; evaluasi proses akan melihat bagaimana kegiatan program berjalan, partisipasi peserta, nara sumber atau guru, penampilan guru/instruktur pada PBM di kelas, bagaimana penggunaan dana, bagaimana interaksi guru dan siswa di kelas. Berapa persen keberhasilan yang telah dicapai, dan memperkirakan keberhasilan di akhir program. Jenis keputusan adalah pelaksanaan (*implementing decision*).

4) Evaluasi product,

Dilakukan pada akhir program, untuk mengetahui keberhasilan program. Sejauh mana tujuan telah dicapai, hambatan yang dijumpai dan solusinya, bagaimana tingkat keberhasilan program meliputi: efektivitas, efisiensi, relevansi, produktivitas, dsb. Evaluasi produk menghasilkan informasi untuk keputusan kelanjutan program (*recycling decision*). Evaluasi produk juga sebagai akuntabilitas pimpinan tentang program yang menjadi tanggungjawabnya kepada stake holder.

g. CSE-UCLA Evaluation Model (*Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles*).

Evaluasi model CSE-UCLA hampir sama dengan model CIPP, termasuk kategori evaluasi yang komprehensif. Evaluasi CSE-UCLA melibatkan 5 tahapan evaluasi, yaitu:

1). Tahap pertama

Evaluasi dimulai dengan *Needs Assessment*, dimana evaluasi mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara status program atau kondisi kenyataan (*what is*) dengan yang diharapkan (*what*

should be). Apa problem yang dihadapi? Gap apa yang ada dalam lembaga?

2). Tahap kedua

Perencanaan dan pengembangan (*program planning and development*), melihat apakah program yang direncanakan sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan? Keputusan yang akan diambil adalah pemilihan strategi untuk mencapai tujuan program.

3). Tahap ketiga Pelaksanaan, evaluasi terfokus pada implementasi program. Evaluasi akan menjawab pertanyaan:

- a). Apakah program berjalan sesuai dengan rencana?
- b). Bagaimana penampilan para guru, siswa?
- c). Bagaimana kesan dan sikap orang tua dan masyarakat?
- d). Bagaimana proses belajar mengajar?
- e). Jenis rekomendasi antara lain: Apa yang perlu dirubah, diperbaiki, dibenahi agar pada tahap akhir program mencapai keberhasilan?

4). Tahap keempat

Evaluasi dilakukan terhadap hasil yang dicapai. Sejauh mana program telah dapat mencapai tujuan yang direncanakan? Apakah hasil yang dicapai sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan?

5). Tahap kelima

Evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap kemanfaatan program. Pertanyaan berkisar pada bagaimana keberadaan program? Bagaimana manfaat program terhadap personal dan lembaga? Jenis rekomendasi pada tahap ini adalah program perlu dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi atau bahkan dihentikan.

h. *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) oleh Provus.

Dikembangkan oleh Malcom Provus, focus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau dihentikan. Evaluasi program dengan model DEM melibatkan 4 tahap

kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan organisasi atau program yang akan dievaluasi:

- 1).Mengidentifikasi program (program definition), Evaluasi focus pada penentuan dan rumusan tujuan
- 2).Penyusunan program (program installation), Evaluasi fokus pada isi atau substansi program, cara-cara, metode, mekanisme untuk mencapai tujuan
- 3).Pelaksanaan kegiatan program (program implementation), Evaluasi difokuskan untuk mengukur perbedaan yang terjadi antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan (standar).
- 4).Hasil yang dicapai program (program goal attainment), Kegiatan evaluasi menginterpretasikan hasil temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Keputusan dapat berupa revisi program dan atau melanjutkan program kegiatan.

Evaluasi mengukur Performance pada setiap tahapan program, dan membandingkan dengan Standar yang telah ditentukan. Pertanyaan evaluasi dalam Model DEM:

- 1).Apakah program sudah diidentifikasi dengan baik dan jelas?
- 2).Apakah program telah disusun dengan baik?
- 3).Apakah program dilaksanakan dengan baik, dan apakah tujuan pendukung (enabling objectives) dapat dicapai
- 4).Apakah tujuan akhir program telah dapat dicapai.

Rangkuman

Pada umumnya tahapan t pembuatan kebijakan Pendidikan, terlebih dalam Menyusun agenda/tahapan perumusan masalah dapat dikategorikan sebagai berikut; 1) *Understanding the problem*; adalah memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi melalui: menerima masalah (analisis gejala), memilih masalah (analisis kegagalan), memodelkan masalah (identifikasi variabel kebijakan), 2) *choosing and explaining relevant policy goal and constraints*, adalah melakukan pemilihan masalah, dan pada tahap, 3) *choosing a solution method* yaitu menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Langkah selanjutnya adalah perumusan kebijakan. Lindblom (1980) dalam bukunya *The Policy-Making Process* mengemukakan lima tahapan untuk mempelajari perumusan kebijakan pendidikan, antara lain: 1) Pelajari bagaimana masalah pendidikan itu timbul dan masuk ke dalam agenda acara para pembuat kebijakan, 2) Pelajari bagaimana khalayak merumuskan masalah pendidikan tersebut untuk pembuatan suatu tindakan, 3) Pelajari sikap apa yang diambil oleh anggota legislatif atau lembaga lainnya atas kebijakan pendidikan, 4) Pelajari bagaimana para pemimpin mengagendakan kebijakan pendidikan itu, 5) Pelajari bagaimana kebijakan pendidikan itu dievaluasi. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, secara spesifik adalah a) Penyusunan agenda pendidikan, b). Formulasi kebijakan pendidikan, c). adopsi kebijakan pendidikan, d). Implementasi kebijakan pendidikan, dan e). Evaluasi kebijakan pendidikan. Adapun Aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari individu, kelompok, dan para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai satu kesatuan sistem kebijakan Pendidikan. Aktor tersebut adalah pemerintah terdiri dari Birokrat Karier, Kantor Kepresidenan dan Kementerian, Lembaga Legislatif dan kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik yang sifatnya non pemerintahan. Formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sebagai pedoman bagi pengelola pendidikan untuk mencapai sasaran atau tujuan Pendidikan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan pendidikan: a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, b) Adanya pengaruh kebiasaan lama, c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, d) Adanya pengaruh dari kelompok luar, e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Berikut teori dalam formulasi kebijakan pendidikan adalah; Teori inkrementalis, Teori demokratis, Teori Strategis, Teori pilihan publik, Teori system. implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu

kebijakan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. ada delapan Model monitoring dan Evaluasi Program seperti berikut; a) Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan), b) *Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan)*, c) *Formatif-summatif Evaluation Model*, d) *Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi)*, e) *Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)*, f) *CIPP Evaluation Model (Model Evaluation CIPP)*, g) *CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles)*, h) *Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Provus*

Soal Latihan

MC

Berikut ini mana yang merupakan faktor-faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan Pendidikan?

- Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, pengaruh kebiasaan lama, dll.
- Berdasarkan strategis, imajenasi.
- Ilmu yang dimiliki.
- Pentingnya Pendidikan untuk semua.

MC

Berikut makna teori Strategis dalam formulasi kebijakan Pendidikan?

- Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang.
- Pemecahan masalah yang terbaik
- Berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada
- preferensi masyarakat dilakukan pada tahap menyusun agenda.

MC

Berikut ini faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan Pendidikan kecuali?

- Lembaga Legislatif dan kelompok
- Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- Adanya pengaruh kebiasaan lama Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- Adanya pengaruh dari kelompok luar
- Adanya pengaruh keadaan masa lalu

MC

Berikut salah satu makna dari teori Inkrementalis dalam formulasi kebijakan pendidikan?

- Melihat kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai.
- Evaluasi kebijakan Pendidikan
- Menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah
- Menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah
- Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

MC

Berikut Model Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan) dalam program monitoring atau Evaluasi Program?

- Model evaluasi awal, memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikatornya adalah prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektivitas PBM, kualitas layanan prima.
- Mengevaluasi hasil atau program Pendidikan.
- Pemerolehan gambaran mengenai efektivitas sistem pendidikan.
- Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan.

BAB IV

(Pertemuan 6 dan 7)

Birokrasi Dan Patologi Birokrasi

A. Pengertian Birokrasi Dan Patologi Birokrasi

1. Pengertian Birokrasi

Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki asal kata dari kata Bureau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat dan Cracy yang berarti aturan. Selanjutnya dalam bahasa Inggris pengertian birokrasi dapat dikatakan sebagai “civil service” kemudian disebut juga dengan “public service”, “public administration” atau “public sector”. Birokrasi dari asal kata tersebut dapat menjelaskan bahwa birokrasi merupakan organisasi formal yang mana lokasi kerjanya disebut kantor. Dari asal kata ini maka birokrasi merupakan suatu organisasi formal pada bidang kerja yang ada pada suatu instansi atau kantor.

Menurut (Muhammad, 2018) birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi/instansi/lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Prabowo, 2022) yang menyatakan bahwa birokrasi adalah sistem kerja pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut (Hasim, 2023) birokrasi pada dasarnya adalah sistem pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya menurut (Endah, dkk, 2021) birokrasi adalah organisasi yang melayani, dan cara agar memperoleh tujuan yang diinginkan dengan berkoordinasi secara sistematis dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang mengatur pelaksanaan administratif secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan yang disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, dan lembaga pemerintah.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah Birokrasi setidaknya-tidaknya dimaknai sebagai berikut (Albrow dalam Bormasa, 2023).

a. Birokrasi Sebagai Organisasi Rasional.

Maksud dari pengertian ini adalah sebagai organisasi yang rasional dalam menidakanjuti setaip kegiatan atau aktivitas dalam organisasi birokrasi harus berpedoman pada aturan organisasi dan dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan rasional.

b. Birokrasi Sebagai Aturan.

Birokrasi ini merupakan rangkaian aturan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk mempermudah berbagai proses dalam pelayanan publik. Tetapi pada kenyataannya banyak para pejabat sering menyalahgunakan aturan tersebut demi kepentingan kelompok dan pribadi. Sehingga mengakibatkan masyarakat antipati terhadap berbagai aturan yang dibuat.

c. Birokrasi sebagai Pemborosan

Pemborosan dalam birokrasi yang disebutkan lebih cenderung mengarah pada pemborosan waktu, tenaga, finansial maupun sumber daya lainnya. Birokrasi sering kali berusaha memebrikan pelayanan yang efisien namun sering terjadi hal-hal yang mengakibatkan pelayanan bagi masyarakat tidak efisien dan juga mengecewakan membuat masyarakat merasa apatis terhadap berbagai bentuk slogan yang sering menggambarkan pelayan organisasi yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi birokrasi para pejabat birokrasi tidak konsisten dan konsekuen dengan perneytaan sehingga birokrasi dianggap sebagai tempat srang penyakit organisasi moderen seperti pembengkakan pegawai, biaya tinggi dan sulit beradaptasi dengan lingkungan.

d. Birokrasi sebagai Administrasi Publik

Birokrasi yang diartikan sebagai administrasi publik merupakan again dari suatu proses kerja sama terhadap pengelolaan sumber daya publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya birokrasi adalah suatu unsur dari pelaksanaan adaministrasi publik untuk dapat mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif dan rasional.

e. Birokrasi sebagai Administrasi

Birokrasi sebagai administrasi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai untuk mencapai berbagai tujuan dari pada organisasi.

f. Birokrasi sebagai Organisasi

Birokrasi sebagai organisasi memiliki struktur dan aturan yang sudah ditetapkan secara jelas dan formal. Organisasi merupakan sistem kerja sama yang mengikutsertakan banyak orang, dan setiap orang yang ada pada organisasi memiliki peran dan fungsi serta berbagai tugas yang telah dibagi serta saling mendukung berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi sebagai sistem kerjasama berarti:

- 1) Setiap sistem dalam organisasi mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang telah dirumuskan dengan baik agar semua pegawai dapat bekerja sama mencapai efektivitas.
- 2) Sistem dalam penugasan bagi para pegawai disesuaikan dengan keahlian dan kekhususan pada setiap bidang kerja.
- 3) Suatu rencana sistem yang harus terbentuk melalui kerja sama dan saling memberikan peran sesuai tugas yang dilaksanakan.

g. Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern.

Setiap masyarakat moderen berlakunya suatu aturan semestinya harus dilaksanakan, karena suatu aturan yang hendak dicapai, dan dilakukan oleh instansi yang formal dan dapat mengendalikan perilaku yang menyimpang terhadap aturan yang telah di buat.

Adapun menurut Zauhar dalam buku Birokrasi dan Pelayanan Publik oleh (Prabowo, 2022) birokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Birokrasi sering mendapat pandangan suatu prosedur yang rasional pada pemerintahan dan aparat administrasi publik.
2. Birokrasi dilihat sebagai organisasi yang memiliki pembengkakan pada jumlah pegawai yang banyak.
3. Birokrasi dipandang sebagai suatu kekuasaan pemerintah yang luas, memiliki tujuan lebih kepada mengontrol kegiatan dari Masyarakat

Kesimpulannya bahwa peran birokrasi ini pada hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik khususnya pada pelayanan pendidikan disekolah. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan dan sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi pendidikan sangat diperlukan karena merupakan suatu strategi dan cara mudah dan praktis dalam memberikan pelayanan Masyarakat khususnya dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan harus dikelola dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.

2. Pengertian Patologi Birokrasi

Menurut (Hasyem & Ferizaldi, 2020) patologi birokrasi merupakan penyakit di tubuh birokrasi. Penyakit-penyakit birokrasi telah tumbuh subur, berakar dan membudaya serta bergentayangan di semua struktur birokrasi dalam negara kita. Menurut (Hasim, 2023) Beberapa contoh patologi birokrasi dalam pelayanan publik termasuk prosedur yang rumit dan lambat, korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparan, diskriminasi, dan ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas.

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh (Hasim, 2023) patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan para peneliti untuk mengatasi masalah tersebut. Birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah. Namun, beberapa solusi telah dikemukakan oleh para peneliti seperti reformasi birokrasi, partisipasi publik, dan pelatihan dan pengembangan staf birokrasi yang dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut ini akan diuraikan secara detail mengenai cara untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik.

1. Patologi birokrasi dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk legitimasi institusi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya

untuk memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik.

2. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik dari masyarakat tentang kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengatasi patologi birokrasi.
3. Pelatihan dan pengembangan staf birokrasi juga penting untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Pelatihan yang baik dan pengembangan staf dapat meningkatkan kualitas staf birokrasi, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

B. Sistem Pendidikan dan Otonomi Pendidikan

Dalam menjalankan otonomi pendidikan tidak lepas dari peran lembaga sebagai aktor dalam proses pendidikan. Menurut (Indrawan, 2024) lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah

Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengelola urusan strategis pendidikan di tingkat nasional. Dalam hal ini perlu dibuat pengaturan pertimbangan kewenangan antara pusat dan daerah serta harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tujuan otonomi. Sebab berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah meliputi pemerintah pusat yang benar-benar memberdayakan daerah, niat baik pemerintah daerah membantu keuangan daerah dan perubahan perilaku elite lokal untuk membangun daerah. Hal ini penting karena banyak yang khawatir otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar kepada bupati/wali kota justru akan melahirkan raja-raja kecil yang tidak akan merubah apapun kecuali kehancuran sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, hal ini terlihat pada daerah yang kaya. dalam sumber daya alam. Dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal strategis pendidikan pada tatanan nasional yang meliputi (a) pengembangan

kurikulum pendidikan nasional, (b) bantuan teknis, (c) bantuan dana, (d) monitoring, (e) pembakuan mutu, (f) pendidikan moral dan karakter bangsa, dan (g) pendidikan bahasa indonesia.

Sedangkan pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal operasional pendidikan, khusus dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, serta pembiayaan sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis dimana budaya dialog, komunikasi, hubungan interpersonal, pelatihan bersama, diberikan tempat yang luas dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan. Bidang pemerintahan ini perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengelolaan urusan strategis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan operasional pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2. Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS pada poin 4 menyebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya tersebut dibentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Komite Sekolah merupakan badan independen yang menampung partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Anggota Komite Sekolah terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua dan masyarakat.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi daerah dalam mengelola pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari unsur masyarakat (LSM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, dunia usaha/industri, asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga kependidikan dan komite sekolah), unsur birokrasi dan legislatif (dinas pendidikan), anggota DPRD). Komite

Sekolah dan Dewan Pendidikan merupakan badan independen, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya. Kedudukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mengacu pada kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peran Dewan Pendidikan adalah sebagai pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu juga berperan sebagai penunjang baik finansial, mental, dan tenaga dalam terselenggaranya pendidikan. Peran Dewan Pendidikan lainnya adalah sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) serta masyarakat.

Sedangkan Komite Sekolah merupakan pemberi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik secara finansial, pikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga berperan sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam melaksanakannya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga menjalin kerja sama dengan masyarakat, baik individu maupun organisasi, dunia usaha dan industri, pemerintah, dan DPRD terkait penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diungkapkan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa. Masa depan bangsa dapat diketahui dari sejauh mana komitmen masyarakat dan bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Cita-cita bangsa untuk mencerdaskan masyarakat tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga dapat ditarik kesepakatan bahwa persoalan pendidikan merupakan pekerjaan besar yang harus diutamakan untuk membentuk masyarakat pendidikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan demikian peran lembaga-lembaga dalam otonomi pendidikan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah sangat saling terkait dan saling mendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peran lembaga dalam mencapai prestasi yang bermutu dan tepat guna sangat diharapkan, sehingga terciptalah pendidikan yang menyentuh kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta mampu menyentuh daerah dalam artian pendidikan mampu menggali potensi yang dimiliki masyarakat. wilayah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

C. Institusi Analisis Kebijakan Pendidikan

Menurut (Arwildayanto, dkk, 2018) analisis kebijakan pendidikan merupakan kegiatan memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat (Wardani, dkk, 2022) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternatif hingga pada penyampaian alternatif terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan. Menurut (Rusdiana, 2023) rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Rumusan kebijakan tersebut harus didukung oleh suatu kekuatan otoritas, yang kemudian kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Sehingga, dalam menghasilkan suatu kebijakan harus melalui proses yang rasional. Sedangkan terjadinya kebijakan itu sendiri merupakan proses politik. Pemisahan proses yang rasional dengan proses politik dalam pengambilan kebijakan kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Proses yang rasional empiris dalam analisis kebijakan tersebut sering digunakan

sebagai alasan dasar dalam suatu perjuangan politik dari salah satu kepentingan. Mungkin juga sebaliknya, proses politik merupakan salah satu bentuk proses rasional karena politik berbicara mengenai kepentingan masyarakat banyak.

Adapun menurut (Ghazali, dkk, 2021) analisis kebijakan pendidikan adalah sebuah ilmu sosial yang dalam penerapannya secara tersusun dan bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok kebijakan pendidikan. Sehingga dengan begitu para penyusun kebijakan dapat mengetahui permasalahan Pendidikan secara lebih detail dan dapat dengan tepat memilih cara apakah yang tepat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang secara khusus mengamati seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, seperti menganalisis masalah, menentukan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut dan penetapan keputusan terhadap kebijakan pendidikan.

Adapun kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Rangkuman

Birokrasi dapat diartikan sistem kerja pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara secara efektif dan efisien. suatu prosedur yang mengatur pelaksanaan administratif secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan yang disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, dan lembaga pemerintah. Birokrasi setidaknya dimaknai sebagai berikut, a) Birokrasi Sebagai Organisasi Rasional, b) Birokrasi Sebagai Aturan, Birokrasi sebagai Pemborosan, Birokrasi sebagai Administrasi Publik, e) Birokrasi sebagai Administrasi, f) Birokrasi sebagai Organisasi. Patologi birokrasi merupakan penyakit di tubuh birokrasi. Penyakit-penyakit birokrasi telah tumbuh subur, berakar dan membudaya serta bergentayangan di semua struktur birokrasi dalam negara. Berikut ini cara untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. 1) Patologi birokrasi dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk legitimasi institusi pemerintah. 2) Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik dari masyarakat tentang kualitas dan efektivitas pelayanan publik. 3) Pelatihan dan pengembangan staf birokrasi juga penting untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Otonomi pendidikan tidak lepas dari peran lembaga sebagai aktor dalam proses Pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut adalah: a) Pemerintah, b) Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang secara khusus mengamati seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, seperti menganalisis masalah, menentukan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut dan penetapan keputusan terhadap kebijakan pendidikan.

Soal Pelatihan

MC

Berikut makna singkat dari birokrasi dalam Pendidikan?

- Suatu prosedur yang mengatur pelaksanaan administratif secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan yang disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, dan lembaga pemerintah.
- Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi,
- Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah
- Pendidikan akan menjadi lacer bila ada unsur politik

MC

Berikut makna Birokrasi Sebagai Organisasi Rasional?

- Sebagai organisasi yang rasional dalam menidaklanjuti setiap kegiatan atau aktivitas dalam organisasi birokrasi harus berpedoman pada aturan organisasi dan dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan rasional
- Pendidikan dan mempunyai hubungan secara signifikan
- Birokrasi pendidikan memang diperlukan
- Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana dalam organisasi formal

MC

Berikut Solusi mengatasi masalah patologi birokrasi dalam pelayanan publik (Pendidikan)?

- Action Oriented (Tidak Menunda)
- Pelatihan dan pengembangan staf birokrasi untuk mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan publik termasuk kemampuan memberikan layanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat
- Memberikan stabilitas dan kesinambungan dalam sistem politik
- Memberikan jaminan bahwa pemerintahan dilaksanakan dengan cara yang tertib dan dapat diandalkan
- Mampu melayani publik secara netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

MC

Berikut komitmen pemerintah daerah dalam Sistem Pendidikan dan Otonomi Pendidikan?

- Memberikan kebebasan dan tanggung jawab terhadap kualitas Pendidikan secara umum
- Mengurus hal-hal operasional pendidikan, khusus dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, serta pembiayaan sarana dan prasarana.
- Pembelajaran di dilaksanakan secara demokrasi.
- Untuk mengatur kebijakan dan mengambil keputusan terkait pengembangan personel pendidikan
- Kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MC

Berikut peranan analisis kebijakan dalam program pendidikan?

- Merupakan suatu disiplin ilmu yang secara khusus untuk mengamati seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan dalam menganalisis masalah, menentukan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut dan penetapan keputusan terhadap kebijakan pendidikan.
- Mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan
- Penyusunan kurikulum berdasarkan standar sekolah masing-masing
- menganalisis data dan informasi pendidikan
- Penyusunan kurikulum berpusat pada kekuasaan negara

BAB V

(Pertemuan 8 dan 9)

Kebijakan pendidikan di Tingkatan Makro

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggungjawab terhadap tuntutan perubahan zaman. Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional (Suyana, 2024).

Dalam hal ini menurut (Siswanto, dkk, 2021) keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi dalam membuat kebijakan dapat mempengaruhi keberadaan dan proses pendidikan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Keputusan pada masalah pendidikan tingkat nasional (makro) secara khusus menjadi tugas Komisi X DPR RI Presiden RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan baik di tingkat meso (daerah) maupun mikro (satuan).

Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah sebagai Upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan yang dibuat oleh negara yaitu berkenaan dengan Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kebijakan pendidikan Nasional merupakan suatu produk yang dijadikan sebagai

panduan dalam pengambilan Keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Kebijakan pendidikan nasional disebut dapat memperkuat peran negara dengan memastikan 20% anggaran negara untuk pendidikan nasional, akan tetapi di sisi lain ada pasal yang memperkuat peran publik dengan adanya komite-komite sekolah.

B. Tahapan Kebijakan Pendidikan Nasional

Secara teoritik, tahapan kebijakan Pendidikan nasional merupakan suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan dari pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Menurut (Siswanto, dkk, 2021) untuk menentukan tahap kebijakan menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan paham teori yang dianutnya. Ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu atau yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Social Demand Approach*

Suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan dari pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan kalau perlu mereka melakukan *hearing* dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung. Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjangkaran aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (*grass- root*) bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Sedangkan yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjangkaran aspirasi dari bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, sarasehan, dan sebagainya.

Pendekatan *social demand* sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari

seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi, baik pada masamperumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dengan mencermati uraian tersebut, *social demand approach* dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu. Dengan demikian, para pejabat berwenang hanya bersifat menunggu dan hanya selalu menunggu. Namun dari sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan dimungkinkan akan mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Oleh sebab itu, dengan pendekatan jenis ini tingkat ketercapaian dari implementasi kebijakan relatif tinggi dan resiko kegagalannya akan rendah.

2. *Man-power approach*

Sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan kepada pertimbangan- pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya dan juga sebagai seorang visioner. Tidak hanya sekedar menjalankan tugas-tugas rutin dan ritual dalam memimpin masyarakatnya; akan tetapi ia juga bisa melihat jauh ke depan cita-cita yang akan dicapai masyarakatnya serta cara-cara untuk mencapainya. Dengan kemampuan visioner dari sang pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka sang pemimpin tersebut bisa membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya.

Dalam pendekatan *man-power*, pemerintah sebagai pemimpin suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan

bisa maju manakala memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan kapalitas yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator empirik dari penguasaan kualitas dari masing-masing warga bangsa adalah tingkat pendidikan formal para anggotanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas.

Beberapa catatan yang dapat dipetik dari *man-power approach* di atas adalah bahwa pendekatan ini secara umum lebih bersifat otoriter. *Man-power approach* pada umumnya kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Sehingga terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, pendekatan *man-power* lebih efisien dalam proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang.

C. Format dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Menurut (Arwildayanto, dkk, 2018) implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan *stakeholder* pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (*public*). Dalam hal ini, dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhir tahapan evaluasi kebijakan, menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan. Jika demikian, bisa dikatakan implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Konteks pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan, bisa dilihat dari makna *organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect*. Maksudnya, aktifitas implementasi kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian (*organization*) sebagai upaya menetapkan dan menata

sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan. Ada beberapa pengorganisasi dilakukan, yaitu; a) penataan sumber daya manusia yang kompeten, misalnya implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memerlukan SDM yang handal, b) Standar Operasional Procedure (SOP), misalnya kebijakan BOS memerlukan panduan berupa SOP baku menunjang keberhasilan implementasinya, c) kesatuan antar pelaksana, d) penetapan sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi kebijakan BOS harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, misalnya untuk sekretariat pengelola.

Sedangkan dalam konteks inprestasi, bisa dimaknai dari konsepsi *interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*. Tahapan interpretasi (*interpretation*) disini merupakan penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap Interpretasi disini menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Pada aspek interpretasi (*interpretation*) meliputi antara lain: isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya, dukungan dan sikap masyarakat Terkaita dengan penerapann, dimaknai bahwa *application is the routine of service, payments, or other agree upon objectives or instrument*. Tahapan *application* ini merupakan tahapan aktivitas penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Tahapan aplikasi ini sering juga disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan.

Rangkuman

Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggungjawab terhadap tuntutan perubahan zaman. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi dalam membuat kebijakan yang mempengaruhi keberadaan dan proses pendidikan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan yang dibuat oleh negara yaitu berkenaan dengan Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam menentukan tahap kebijakan menggunakan pola pendekatan, ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu atau yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan Pendidikan yaitu; 1) Social Demand Approach, 2) Man-power approach. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (public). Tetapi jika ada tahapan implementasinya dan tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhir tahapan evaluasi kebijakan, menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan.

Soal Latihan

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan makna dari Kebijakan Pendidikan Nasional?

- Merupakan suatu produk sebagai panduan dalam pengambilan Keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat
- Bebas mengatur waktu, mengambil keputusan, dan menentukan arah
- Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu
- Mengembangkan kemampuan serta membentuk watak
- Kriteria minimal tentang sistem pendidikan

MC

Berikut ini mana yang merupakan makna Social Demand Approach pada kebijakan pendidikan?

- Suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan didasarkan pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh Masyarakat merupakan pendekatan dalam pengambil kebijakan pendidikan
- Menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung
- Menganggap penting pendidikan dan kehidupan spiritual
- Proses penjaringan aspirasi

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan makna Man-power approach?

- Pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya
- Pendekatan yang menitikberatkan kepada pertimbangan- pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat.
- Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan
- Perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat
- Proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang.

MC

Makna dari *“organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect”* pada saat implementasi kebijakan pendidikan?

- Implementasi kebijakan tidak seiring sejalan
- Kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian sebagai upaya menetapkan dan menata sumber daya dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan tujuan kebijakan pendidikan
- Menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih dalam bentuk abstrak
- Memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi
- Formulasi kebijakan dilakukan dengan baik dan sesuai

BAB VI

(Pertemuan 10)

Kebijakan Pendidikan Ditingkat Messo

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Menurut (Heriawan, 2018) kebijakan pendidikan dalam bentuk desentralisasi pendidikan adalah perlimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian menurut (Rusdiana, 2023) desentralisasi pendidikan mengindikasikan bahwa penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di bawahnya. Selanjutnya menurut (Sofiani, 2024) desentralisasi pendidikan adalah suatu kebijakan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rozak, 2021) otonomi daerah jelas menunjuk pada kemandirian daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa atau mengupayakan seminimal mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menerima input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas. Dengan adanya otonomi tersebut, daerah bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan tingkat provinsi merupakan kuasa dan tanggungjawab

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi oleh setiap daerah memiliki sejarah sendiri, kondisi dan potensi sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya dan daerah mengetahui keadaan permasalahan dan aspirasinya. Desentralisasi pendidikan daerah berfungsi untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan di daerah, substansi pendidikan menjadi orientasi lokal, sasaran pendidikan tercapai, dan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kemudian regulasi urusan kebijakan pembagian dibidang pendidikan untuk provinsi berlandaskan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolah Pendidikan menengah b. Pengelolah Pendidikan Khusus
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan local Pendidikan menengah dan muatan local Pendidikan khusus
3	Akreditasi	Melakukan akreditasi pada level Pendidikan dasar dan menengah
4	Pendidikan dan tenaga pendidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1(satu) daerah provinsi
5	Perizinan pendidikan	a. Penerbitan ijin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Penerbitan ijin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan sastra yang menurutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah peovinsi

Melalui desentralisasi yang dalam pelaksanaannya disebutkan sebagai otonomi daerah adalah upaya melalui mana masyarakat memegang peranan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada konteks ini keberdayaan masyarakat pada penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah menjadi penting. Masyarakat memegang posisi sebagai salah satu unsur yang berperanan dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Armida S. Alisjahbana (2000: 3), menyebutkan bahwa dalam wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan, ada beberapa kewenangan-kewenangan pendidikan yang dapat didesentralisasikan, yakni sebagai berikut:

Komponen Pendidikan	Kewenangan
Organisasi dan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid - Waktu belajar di sekolah - Penentuan buku yang digunakan - Kurikulum - Metode pembelajaran
Manajemen guru	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih dan memberhentikan kepala sekolah - Memilih dan memberhentikan guru - Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru - Menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru
Struktur dan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka atau menutup sekolah - Menentukan program yang ditawarkan sekolah - Definisi dari isi Pelajaran - Pengawasan atas kinerja sekolah
Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sekolah - Alokasi Anggaran Untuk Guru Dan Tenaga Administrasi (Personil) - Alokasi Anggaran Non – Personel - Alokasi Anggaran Untuk Pelatihan Guru

Tujuan Kebijakan Meso Pendidikan (level pemerintah daerah)

Pada hakekatnya kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar pendidikan nasional. Dengan adanya Standar secara Nasional Pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan. Sebagaimana pelaksanaan program wajib belajar dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Suyanta, et al. 2020: 29).

Pinsip-Pronsip Kebijakan pendidikan Meso

Ada beberapa prinsip dalam Kebijakan Meso pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan, yaitu:

- a. Hasil dan kinerja sekolah harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan.

- b. Kualitas berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi tendik yang dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan desentralisasi (otonomi).
- c. Otonomi sekolah harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil sekolah.
- d. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil pendidikan, diaktualisasi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah.
- e. Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di sekolah adalah proses evaluasi.

B. Tahapan Kebijakan Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Menurut (Suhelayanti, 2019) proses kebijakan pendidikan melalui beberapa tahapan, diantaranya.

1. Tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah. Pada tahapan ini dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu.
2. Tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.
3. Tahap implementasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses kebijakan yang menentukan, dimana kebijakan bersentuhan langsung dengan stakeholder pendidikan serta dapat di terima oleh masyarakat. Melakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
4. Tahap penghentian atau perubahan kebijakan, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan mendasar

berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.

Kebijakan pendidikan dibuat dengan tujuan untuk merealisasikan keberhasilan tujuan pendidikan. Adapun menurut (Heriawan, 2018) tujuan kebijakan pendidikan, yaitu : (1) melaksanakan kebijakan pendidikan secara otonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diberi pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pengelolaan manajemen atau administrasi pendidikan di tingkat SLTA dan SMK secara otonom, (3) memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan rencana strategis pendidikan terarah dan jelas, (4) pelaksanaan pengembangan program pendidikan terarah dan jelas sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan daerah, (5) menciptakan lembaga pendidikan dan kelulusan anak didik yang kualitas dan kuantitas serta siap berkompetitif, (6) untuk memperbaiki dan merekomendasikan rangkaian aktivitas untuk memecahkan masalah kependidikan, (7) implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan Masyarakat

C. Format Dan Implementasi Pendidikan Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan. Kebijakan publik salah satu implementasi pendidikan formal SLTA dan SMKA pengelolaan oleh pemerintah provinsi sedangkan tingkat SD, SLTP, dan SLTA pengelolaan oleh pemerintah kabupaten dan kota dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan.

Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya pengelolaan SLTA dan SMK. Kebijakan otonomi pendidikan dimaksud, mencakup manajemen pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana diklat, dan anggaran pendidikan termasuk kesejahteraan para pendidikan dan

penempatan pendidik. Adanya kebijakan pendidikan tersebut ke depan diharapkan yaitu:

Pertama, implementasi sekolah semakin pengelolaan dan meningkat kualitas pendidikan. Kedua, Kualitas pendidikan menjadi komponen utama pembangunan di daerah. Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara otonomi mencakup terutama sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, dana operasional pendidikan. Keempat, pendidikan merupakan investasi. Keempat, pendidikan formal merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia daerah berkualitas dan siap berkompetitif. Kelima, adanya pemerataan pengelolaan pendidikan di daerah.

Keenam, dampak kebijakan pendidikan secara otonomi yaitu meningkatkan kreativitas, inovatif, dan aktif para pendidik atau guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Ketujuh, pelimpahan kebijakan kependidikan akan membuka seluas-luasnya pengelolaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkompetitif. Kedelapan, implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Kesembilan, implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK mewujudkan keberhasilan manajemen pendidikan mencakup tenaga pengajar, anggaran, sapras, kurikulum berbasis lokal, dan penempatan tenaga pengajar.

Kemudian kewenangan pengelolaan pendidikan ditangani oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk pemantauan, pengawasan, dan perkembangan implementasi pendidikan SLTA dan sekolah menengah kejuruan termasuk sarana dan prasaran, tenaga pengajar, dan bantuan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk menunjang program pendidikan. Di sisi lain, untuk mewujudkan otonomi pendidikan perlu didukung oleh manajemen pendidikan yang baik sehingga pelaksanaan pendidikan di daerah dapat berjalan mandiri, terprogram, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal di atas, maka kebijakan pelaksanaan pendidikan di Kalimantan Timur diharapkan berjalan efektif, efisien, dan sukses. Namun sisi lain, teknis operasional dilapangan banyak kendala atau problematik dan tantangan seyogyanya segera diatasi secara saksama.

Rangkuman

Kebijakan pendidikan tingkat provinsi merupakan kuasa dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sistem pendidikan di wilayahnya atau bisa juga dimaknai sebagai kebijakan pendidikan dalam bentuk desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menerima input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tua dan komunitas. Dengan adanya otonomi tersebut, daerah bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya, desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerah. kebijakan pendidikan tingkat provinsi merupakan kuasa dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Fungsi Desentralisasi pendidikan daerah menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan di daerah, substansi pendidikan menjadi orientasi lokal, sasaran pendidikan tercapai, dan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan kebijakan pendidikan, pada level meso antara lain; melaksanakan kebijakan pendidikan secara otonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku., pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diberi pelimpahan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pengelolaan manajemen atau administrasi pendidikan di Tingkat SLTA dan SMK secara otonom, memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan rencana strategis pendidikan terarah dan jelas, pelaksanaan pengembangan program pendidikan terarah dan jelas sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan daerah, menciptakan lembaga pendidikan dan kelulusan anak didik yang kualitas dan kuantitas serta siap berkompetitif, implementasi kebijakan kependidikan provinsi tingkat SLTA dan SMK dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Ada beberapa prpsip

dalam Kebijakan Meso antara lain; Hasil dan kinerja sekolah harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, Kualitas berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi tendik yang dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan desentralisasi (otonomi), Otonomi sekolah harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil sekolah, Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil pendidikan, diaktualisasi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah. Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di sekolah adalah proses evaluasi. proses kebijakan pendidikan melalui beberapa tahapan, diantaranya; (1) Tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah, (2) Tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, (3) Tahap implementasi, (4) Tahap penghentian atau perubahan kebijakan.

Soal Latihan

MC

Berikut makna dari desentralisasi pendidikan adalah pada kebijakan Tingkat Messo?

- Suatu kebijakan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya.
- Untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan.
- Implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah provinsi
- Upaya melalui masyarakat memegang peranan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

MC

Berikut fungsi desentralisasi pendidikan di Tingkat daerah (level mесо)?

- Kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola oleh pemerintah.
- Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan di daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
- Mewujudkan otonomi Pendidikan daerah dengan seluas-luasnya.
- Manajemen Pendidikan di daerah dapat berjalan mandiri, terprogram, dan berkelanjutan.
- **Dapat diwujudkan dalam proses Pembangunan.**

MC

Berikut prinsip kebijakan Pendidikan meso?

- Membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dibidang pendidikan.
- Hasil dan kinerja sekolah harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan.
- Pelimpahan kebijakan kependidikan akan membuka seluas-luasnya pengelolaan program pendidikan
- Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkompetitif.
- Memperoleh informasi yang handal

MC

Berikut tahapan pada proses kebijakan Pendidikan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kecuali?

- Tahap merealisasikan keberhasilan tujuan
- Tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah.
- Tahap perumusan dan otorisasi kebijakan.
- Tahap implementasi.
- Tahap penghentian atau perubahan kebijakan

BAB VII

(Pertemuan 11) Kebijakan Pendidikan Di Tingkatan Mikro

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Tingkat PT/Madrasah/Sekolah

Menurut (Bili, dkk, 2023) kebijakan mikro berada dan menjadi kewenangan satuan pendidikan, yaitu kepada sekolah dan guru-guru di sekolah. Sedangkan menurut (Rusdiana, 2023) pada buku mata kuliah kebijakan erusahaan semester VI menyatakan bahwa erusahaan kebijakan mikro berlaku dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Kebijakan makro menjadi landasan untuk kebijakan meso dan kebijakan mikro. Konsep tersebut seperti mata air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.

Pada hakikatnya, kebijakan mikro (Local Level), kebijakan mikro meliputi atau mencakup di lingkup perusahaan, organisasi, komunitas dan kelompok. Kebijakan mikro berlaku untuk lingkup tertentu seperti yang telah disebutkan, sehingga kebijakan mikro di lingkup tertentu bias tidak sama dengan yang lainnya, dan kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Contoh kebijakan mikro adalah peraturan tertulis di Sekolah/Madrasah tentang tata cara berpakaian yang sopan santun, berkerah, tidak ketat, dan bersepatu. Kebijakan tersebut diangkat menjadi contoh karena bisa saja kebijakan tersebut tidak berlaku di luar lingkup Sekolah/Madrasah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mikro merupakan level kebijakan yang berada pada ruang lingkup suatu kelompok, seperti perusahaan, organisasi, komunitas, dan lain-lain yang memuat aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota dalam skala mikro.

B. Konsep kebijakan Mikro pembangunan Pendidikan Nasional

1. Makna dan Hakikat Kebijakan Mikro Pendidikan

Kebijakan publik merupakan kebijakan pendidikan bersifat mikro, yang mengatur pelaksanaan/implementasi dari sebuah kebijakan. Bentuk kebijakan dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu namun tetap berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan beberapa

variabel yang harus dikaji secara menyeluruh, kemudian terdapat beberapa tahapan dalam proses penyusunan kebijakan publik yang perlu dikaji. Kebijakan mikro cakupannya di lingkup Lembaga, perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok. Khusus kebijakan mikro bidang pendidikan berada pada kebijakan di level lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren dll. Kebijakan mikro tidak akan sama antara satu lembaga dengan Lembaga lainnya atau satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kebijakan mikro tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Misalnya, adanya peraturan sekolah memakai hijab di sekolah berbasis agama, belum tentu berlaku di sekolah lain.

Berdasarkan ulasan di atas, disimpulkan bahwa tingkat kebijakan mikro berlaku dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Kebijakan makro menjadi landasan untuk kebijakan meso dan kebijakan mikro.

2. Tujuan Kebijakan Mikro Pendidikan dan Penerapan Sistem Pendidikan Secara Mikro

Kebijakan pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan. Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan diharapkan kualitas pendidikan dapat diwujudkan dalam proses pembangunan. Sebagaimana pelaksanaan program wajib belajar dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peran dan Ekspetasi Birokrasi Kebijakan di Lembaga Sekolah/Madrasah tataran Mikro Pendidikan

Reformasi pendidikan dewasa ini secara prinsip lebih mengarah kepada dua sasaran utama. Pertama reformasi pendidikan diarahkan untuk memberikan tanggungjawab lebih besar kepada birokrasi di daerah untuk secara langsung menangani pendidikan, dengan memobilisasi dukungan penuh masyarakat (desentralisasi). Kedua, reformasi yang ditujukan untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah, seperti: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam proses melaksanakan penyelenggaraan sekolah sehari-hari (otonomi sekolah) atau lebih di kenal dengan istilah “Manajemen Berbasis Sekolah”.

Ekspetasi birokratis adalah tuntutan dan kewajiban secara formal yang ditetapkan oleh suatu organisasi termasuk di satuan lembaga

pendidikan; ekspetasi birokratis merupakan bahan mentah utama dalam struktur organisasional. Peran birokratis ditentukan oleh serangkaian ekspetasi yang dileburkan ke dalam posisi dan jabatan di dalam suatu organisasi tertentu. Dilembaga sekolah seperti; jabatan kepala sekolah, guru dan siswa sangat penting dan masing-masingnya didefinisikan berdasarkan serangkaian ekspetasi. Ekspetasi birokratis memerinci dan menetapkan perilaku yang semestinya/tepat bagi peran atau posisi tertentu. Seorang guru, mengemban kewajiban untuk merancang pengalaman belajar para siswa dan memiliki tugas untuk melibatkan para murid dengan cara yang efektif secara pedagogis. Peran dan ekspetasi birokratis merupakan cetak biru resmi bagi aksi, yang merupakan hadiah/fasilitas organisasi jabatan

Kesimpulanya bahwa organisasi formal seperti sekolah/madrasah memiliki struktur yang terdiri atas ekspetasi dan peran birokratis, sebuah hierarki jabatan dan posisi, aturan dan peraturan, serta spesialisasi. Ekspetasi birokratis dapat dimaknai adalah sebuah peran-peran organisasional; peran dileburkan ke dalam posisi dan jabatan. Adapun posisi dan jabatan disusun ke dalam sebuah hirarki kewenangan/otoritas formal yang sesuai dengan kekuasaan dan status relatifnya. Peraturan dan aturan dan ditetapkan sebagai pedoman dalam memandu pengambilan keputusan dan meningkatkan rasionalitas organisasional, sedangkan tenaga kerja dibagi-bagi sesuai dengan spesialisasi individu di dalam tugas. Budaya perilaku di sekolah sebagian ditentukan oleh struktur organisasinya; sebagian struktur mempermudah dan sebagian yang lain menghambat fungsi sekolah

4. Sistem Kekuasaan dan Politik organisasi Kebijakan di Lembaga Sekolah/Madrasah tataran Mikro Pendidikan

Pada tingkat mikro Sistem kekuasaan Pendidikan ada 4 (empat) sistem kekuasaan internal sebuah birokratis yang menjadi sumber dasar untuk mengontrol Impemetasi Kebijakan kehidupan organisasional (contoh kekuasaan internal di institusi pendidikan sebagaimana uraian di atas), yaitu berupa sistem otoritas, sistem ideologi (iklim dan budaya), sistem kepakaran, dan sistem politik. Ke empat system tersebut adalah:

- a. Sistem otoritas merupakan arus formal kekuasaan melalui saluran-saluran sah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan formalnya;

- b. Sistem ideologi; adalah serangkaian kesepakatan informal di kalangan guru tentang sekolah berikut hubungan hubungannya dengan kelompokkelompok lain yang muncul sewaktu organisasi mengembangkan budayanya;
- c. Sistem kepakaran adalah hubungan timbal balik di kalangan pakar atau kaum profesional untuk memecahkan ketidakpastian-ketidakpastian darurat/genting yang dihadapi oleh organisasi;
- d. Sistem politik adalah jaringan politik organisasi yang tidak memiliki legitimasi dari tiga sistem kekuasaan lainnya. Sistem ini juga tidak memiliki konsensus dan peraturan. Politik bisa dilukiskan sebagai serangkaian permainan yang dimainkan oleh para pemilik kekuasaan. Permainan politik bisa hidup berdampingan dengan sistem-sistem yang sah, bermusuhan dengan sistem, atau menggantikan sistem-sistem kontrol yang sah.

C. Penerapan Sistem Pendidikan Secara Makro dan Meso di Tingkat Mikro

1. Penerapan Sistem Pendidikan Secara Makro dan Mikro

Penerapan system pendidikan secara makro dan mikro bertujuan untuk peningkatan mutu berbasis sekolah yang diharapkan sekolah dapat bekerja sesuai dengan ketentuan tertentu antara lain: Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas pada saat mengatur seluruh sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/adminitrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk:

- a. memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu,
- b. pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan pengurangan kebutuh-an birokrasi pusat.
- c. Pertanggungjawaban (accountability), sekolah/ Madrasah dituntut untuk dapat memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

2. Pertanggungjawaban Penerapan Kurikulum

Penerapan Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk

mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap siswa (Agustiar, 2008), sekolah harus menciptakan suasana belajar yang me-nyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelek-tual dengan menguasai ilmu pengetahuan, te-rampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosio-nal. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Pengembangan kurikulum tersebut harus sesuai dengan kebutuhan siswa.
- b. Pengembangan keterampilan khusus kepada siswa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- c. Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

3. Pertanggungjawaban Personil Sekolah/Madrasah

Personil sekolah; adalah sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Kemudian untuk pembinaan secara profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum dan staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Pada birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah mampu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Begitu juga dalam mengirim guru untuk berlatih di institusi lain yang dianggap berkompeten. Untuk mewujudkan ini semua sekolah harus diperkenankan untuk:

- a. Mengembangkan perencanaan pendidikan dengan prioritasnya di dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.

- b. Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan tujuan-tujuan yang telah sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan mutu.
- c. Membuat laporan terhadap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada stake-holders).

D. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Sekolah/Madrasah

1. Pelasanaa Kebijakan Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah/Madrasah

Pada saat mengimplementasi konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah, maka sangat dibutuhkan partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk instansi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, sekolah harus memperhatikan tahapan sebagai berikut;

- a. Penyusunan basis data dan profil sekolah yang lebih presentatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru , staf) dan keuangan.
- b. Melakukan evaluasi diri (self assesment) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan me-nge-nai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.
- c. Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendi-dikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep Pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan siswa belajar, penyediaan sumber daya , dan pengelolaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.
- d. Berangkat dari visi, dan misi tujuan peningkatan mutu tersebut, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan) termasuk anggarannya. Progam tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijak-an nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan datang.

- e. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampilan, olah-raga, dsb.)
- f. Program sekolah yang disusun bersama antara sekolah, orang tua dan masyarakat yang sifatnya berbeda satu sekolah dengan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena focus kita dalam pengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, Langkah-langkah untuk penyampaiannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

2. Aspek-aspek penting dalam mengimplementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah

Ada dua aspek utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi total sumber daya yang ada dan prioritas untuk melaksanakan program. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya ini dimungkinkan bahwa program tersebut menentukan skala prioritas untuk melaksanakan program tersebut. Prioritas selalu dikaitkan dengan pengadaan peralatan bukan kepada output pembelajaran. Maka dalam pelaksanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus membuat skala prioritas yang mengacu kepada program-program pembelajaran bagi siswa. Namun persetujuan dari proses pendanaan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan prioritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program yang mendukung pencapaian target mutu, sebelum sejumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan.

a. Prioritas Program

Skala priortias program seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun program sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu:

- 1) mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah dalam periode satu tahun
- 2) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus meyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus dilaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang re-presentatif untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan telah juga disesuaikan.
- 3) Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang mutlak untuk menegaskan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, terkait tujuan telah dicapai, dan sejauhmana pencapaiannya. Tujuannya adalah meningkatkan mutu siswa, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengapati Tingkat efektivitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

E. Karakteristik, Permasalahan, dan Solusi Kebijakan Makro Pendidikan

1. Karakteristik Kebijakan Mikro Pendidikan

Pada umumnya karakteristik kebijakan pendidikan penting dipahami karena memiliki ciri-ciri khusus seperti;

- a. Memiliki tujuan pendidikan dan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang lebih khusus, agar tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan
- b. Memiliki aspek legal-formal yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan dapat diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut

- c. Memiliki konsep operasional sebagai pedoman yang bersifat umum, mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai
- d. Dibuat oleh yang berwenang oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan;
- e. Dapat dievaluasi keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki;
- f. Memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika tersebut harus efektifitas, efisiensi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

2. Bentuk Model Kebijakan Mikro Pendidikan

Ruang lingkup Kebijakan mikro dalam pekerjaan sosial adalah: individu, keluarga atau dalam kelompok kecil untuk memfasilitasi perubahan perilaku individu atau dalam relasinya dengan orang lain atau dapat diartikan juga bahwa individu sering mencari layanan pekerja sosial karena pengalaman pahit mereka dalam menyesuaikan diri, relasi interpersonal, atau karena stress dari lingkungan. Pada level mikro ini adalah menciptakan keberfungsian individu. Orientasi dari ranah mikro dalam praktek pekerjaan sosial focus pada kebutuhan individu, masalah dan kekuatan. Praktek pekerjaan sosial mikro adalah jenis yang paling umum dari pekerjaan sosial, dan bagaimana kebanyakan orang membayangkan pekerja sosial memberikan pelayanan. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial terlibat dengan individu atau keluarga untuk memecahkan masalah. Contoh umum termasuk membantu individu untuk mencari perumahan yang tepat, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Terapi keluarga dan konseling individu juga akan jatuh di bawah naungan praktek mikro, seperti yang akan seorang individu atau keluarga, dan pengobatan orang yang menderita kondisi kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan zat.

Rangkuman

Kebijakan mikro adalah level kebijakan yang berada pada ruang lingkup suatu kelompok, seperti perusahaan, organisasi, komunitas dan lain-lain yang memuat aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota dalam skala mikro. Ruang lingkup kebijakanditingkat mikro antara lain Lembaga/institusi, perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok. Khusus kebijakan mikro bidang pendidikan dimana kebijakan berada di level lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren dll. Kebijakan mikro tidak akan sama antara satu Lembaga pendidikan dengan Lembaga pendidikan lainnya atau satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kebijakan mikro tersebut tidak berpengaruh pada pihak di luar lingkup tersebut. Seperti kebijakan tentang berpakaian, ada peraturan sekolah memakai hijab di sekolah berbasis agama, belum tentu berlaku di sekolah lainnya. Tujuan kebijakan secara umum ada;ah mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan, secara khusus mikro adalah untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional Pendidikan, kemudian peranya adalah pertama; memberikan tanggungjawab lebih besar kepada birokrasi di daerah untuk secara langsung menangani pendidikan, dengan dukungan penuh masyarakat (desentralisasi), kedua, untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah, seperti: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam proses melaksanakan penyelenggaraan sekolah sehari-hari (otonomi sekolah) atau lebih di kenal dengan istilah “ Manajemen Berbasis Sekolah”. Strategi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah/madrasah dilaksanakan dengan empat system, seperti; 1)Sistem otoritas, 2)Sistem ideologi, 3)Sistem kepakaran, 4)Sistem politik. Karakteristik kebijakan mikro Pendidikan antara lain memiliki aspek legal-formal yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan dapat diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, Memiliki konsep operasional dan dapat dievaluasi keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti, serta memiliki sistematika yang jelas.

Soal Latihan

MC

Berikut ini ruang lingkup kebijakan di level mikro yaitu:

- Kebijakan nasional atau pemerintah pusat
- Lembaga/institusi, perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok
- Wilayah penguasaan kekuasaan secara politik
- Pemegang saham terbesar terhadap kepemilikan lembaga

MC

Berikut ini yang mana yang merupakan kebijakan level mikro bidang pendidikan

- Sekolah, Madrasah, Pesantren
- Kebijakan Pendidikan di Tingkat wilayah provinsi
- Kebijakan pendidikan di semua sektor
- Kebijakan dilandaskan kepada misi dan visi
- Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang

MC

Berikut adalah merupakan Kebijakan Pendidikan Di Level Mikro?

- Memberikan Pengetahuan Umum
- Memberikan Keterampilan Dasar
- Menyediakan Sumber Daya Manusia
- Alat Transformasi Kebudayaan
- Memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah, seperti: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam proses penyelenggaraan sekolah sehari-hari.

MC

Berikut system yang merupakan Strategi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah/madrasah **kecuali?**

- Sistem otoritas
- Sistem ideologi
- Sistem kepakaran
- Sistem politik.
- Sistem Laissez-faire

MC

Berikut Karatritik kebijkan Pendidikan di level mikro?

- Menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pendidikan
- Pelaksanaan kurikulum berdasarkan standar Nasional
- Memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah instansi
- Penyusunan kurikulum berpusat pada kekuasaan negara

- Mempunyai tujuan

BAB VIII

(Pertemuan 12)

Pendidikan Karakter

A. Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan adanya gagasan terkait dengan pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Upaya dalam membentuk karakter peserta didik, sudah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 yang memuat Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Menurut Asnani (Faturrahman dkk., 2022) pendidikan karakter merupakan sebuah usaha dalam mendidik siswa agar dapat mengambil Keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan dampak yang positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter dimaknai dengan pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan watak dan moral dengan kata lain sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kemauan atau kesadaran dan Tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Demikian juga, seseorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Pendidikan karakter sering juga disebut dengan pendidikan nilai karena karakter adalah *value in action* nilai yang diwujudkan dalam tindakan. Karakter juga sering disebut operative value atau nilai-nilai yang dioperasionalkan dalam tindakan (perilaku).

Hal yang dipahami oleh para ahli bahwa secara mikro pengembangan karakter terbagi menjadi empat pilar, yaitu kegiatan belajar-mengajar di kelas; kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan formal dan non-formal; kegiatan korikuler dan ekstrakurikuler; serta kegiatan keseharian di rumah dan Masyarakat.

2. Konsep Pendidikan Karakter

Konsep dasar Pendidikan Karakter termaktub dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang bertujuan

untuk : 1) menjadikan sekolah sebagai teman belajar yang menyenangkan bagi murid, guru dan tenaga kependidikan; 2) menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah dan Masyarakat; 3) menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan keluarga, serta 4) menumbuhkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Pada dasarnya pendidikan karakter bertujuan untuk mendorong lahirnya manusia yang baik, berkepribadian menarik, bersahaja, beretika, jujur, cerdas, peduli dan Tangguh. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Sehingga Individu yang berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasi. Pendidikan tidak hanya sebatas menransfer ilmu pengetahuan saja, namun lebih dari itu, yakni bagaimana dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai skill yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, serta yang lebih penting adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Alawiyah, 2012) Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila dimana pendidikan karakter dilakukan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan karakter sebagai pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

4. Fungsi Pendidikan Karakter

Menurut Zubaedi (2012:18) fungsi pendidikan karakter ada tiga yaitu fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, fungsi untuk penguatan dan perbaikan, dan fungsi penyaring.

- 1) Fungsi Pembentukan dan Pengembangan Potensi, hal ini agar siswa mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir dengan baik, berhati Nurani dan berperilaku baik serta berbudi luhur,
- 2) Fungsi untuk Penguatan dan Perbaikan, hal ini agar siswa mampu memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, Masyarakat, satuan pendidikan dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, Masyarakat atau instansi secara umum, dan
- 3) Fungsi Penyaring, pendidikan karakter dapat dimanfaatkan agar Masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri.

5. Nilai – Nilai Pembentukan Karakter

Dikutip dari (Putry, 2018) bahwa Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam Publikasinya yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011) telah menetapkan 18 nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empiric Pusat Kurikulum yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya dan tujuan pendidikan nasional. Deskripsi dari setiap nilai karakter yang dirumuskan disajikan dalam tabel berikut:

No	Nilai Karakter	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan agama yang dianutnya, toleransi terhadap ibadah agama lain serta hidup rukun dengan penganut agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan.

3	Toleransi	Sikap dan Tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, sikap dan pendapat serta Tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan metode atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
8	Demokratis	Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.
9	Rasa ingin tahu	Sikap dan Tindakan yang berusaha untuk mengetahui sesuatu secara lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
11	Cinta tanah air	Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
12	Menghargai prestasi	Sikap dan Tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
13	Komunikatif (bersahabat)	Sikap dan Tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
14	Cinta damai	Sikap dan Tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan Kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Sosial	Sikap dan Tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain serta Masyarakat yang membutuhkan.
17	Peduli Lingkungan	Sikap dan Tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
18	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, Masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara serta Tuhan yang Maha Esa.

6. Positif dan Negatif Pendidikan Karakter bila diterapkan di Indonesia

Beberapa dampak positif atau manfaat apabila pendidikan karakter diterapkan di Indonesia, diantaranya adalah :

- a. Pendidikan karakter sebagai bentuk pembiasaan generasi muda untuk merefleksi diri atas pengalaman hidup,
- b. Pendidikan karakter sebagai bekal bagi generasi muda untuk menghadapi permasalahan dalam Masyarakat sehingga dapat menimbang yang baik dan yang buruk bagi dirinya sendiri tanpa guru atau orang tua dalam menentukan pilihan dan mengatur kehidupannya,
- c. Pendidikan karakter sebagai bekal moral kepemimpinan, kepedulian, toleransi, kemandirian, diplomatis, tanggung jawab, percaya diri, antusias dan kerja keras yang harus ditanamkan sehingga dapat meminimalisir perilaku seks yang dapat mempengaruhi perkembangan mental remaja,
- d. Pendidikan karakter menanamkan prinsip Pancasila yang harus tertanam kuat dalam setiap pribadi remaja sebagai upaya memperbaiki perkembangan moral remaja Indonesia,
- e. Pendidikan karakter membantu remaja untuk menemukan jati diri yang sebenarnya,

- f. Pendidikan karakter diharapkan mampu untuk menjadikan setiap remaja sebagai Uswatun Hasanah (teladan yang baik) bagi dirinya dan lingkungan sosial budayanya,
- g. Pendidikan karakter memberikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang diharapkan.

Selanjutnya pada penerapan Pendidikan Karakter terdapat beberapa kelemahan atau dampak negatifnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Terkadang pendidikan karakter telah diterapkan di sekolah, namun di rumah orang tua cenderung tidak peduli dengan perkembangan anak sehingga penerapan pendidikan karakter hanya terjadi di sekolah saja yang berada dalam pantauan guru yang mana siswa akan berusaha tampil sebaik mungkin, sedangkan Ketika berada di rumah, siswa sudah tidak peduli lagi,
- b. Tidak semua guru memberikan contoh yang baik pada siswa,
- c. Terkadang guru hanya mengajarkan tetapi tidak menekankan sehingga sulit untuk mengetahui secara jelas apakah pendidikan karakter sudah dapat diserap oleh siswa,
- d. Pendidikan karakter bersifat berkelanjutan sehingga harus selalu di *Upgrade*,
- e. Keberhasilan pendidikan karakter bertumpu pada kesadaran siswa.

7. Pendidikan Karakter dan Prestasi Belajar Siswa

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat beberapa faktor yang membentuk karakter individu, yaitu:

- a) Faktor internal (kondisi fisik, kecerdasan peserta didik, minat, motivasi, bakat dan sikap)
- b) Faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah).

Pendidikan karakter sangat penting dilakukan, karena peserta didik akan dapat mengenali jati dirinya, menunjang kreatifitas, membentuk sifat yang baik, menambah kepedulian terhadap sesama, membangun sifat kepemimpinan dan metode untuk mengembangkan karakter. Apabila ditinjau dari pendidikan karakter dan prestasi belajar siswa, maka masing-masing memiliki hubungan satu sama lain yang mana pendidikan dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana dalam rangka pembentukan karakter melalui proses pembelajaran di sekolah. Terdapat beberapa dasar karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mencapai kesuksesan dalam belajar, yaitu dengan adanya tujuan belajar, selalu berpikir positif, percaya diri, disiplin, tekun, jujur, mampu mengambil resiko dan bertanggung jawab. Jika nilai karakter sudah tertanam dalam diri peserta didik, maka akan membawa pengaruh bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar. Adab, moral dan sikap lebih tinggi derajatnya daripada ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bekal kelak untuk masuk ke dunia kerja sehingga pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

Rangkuman

Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha dalam mendidik siswa agar dapat mengambil Keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan dampak yang positif kepada dirinya sendiri dan lingkungannya. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti merupakan konsep dasar dari Pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter anak bangsa, yang tertuang dalam Pancasila serta dapat mengembangkan potensi peserta didik. Ada tiga poin besar fungsi pendidikan karakter yaitu; pembentukan dan pengembangan potensi, penguatan dan perbaikan, serta sebagai penyaring. Terdapat 18 nilai pembentuk karakter berdasarkan hasil kajian empiric Pusat Kurikulum yaitu; Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa, ingin tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi Komunikatif (bersahabat), Cinta damai, Gemar Membaca, Peduli Sosial, Peduli Lingkungan, Tanggung Jawab. Kemudian ada beberapa dampak positif atau manfaat dari pendidikan karakter diterapkan di Indonesia, diantaranya adalah; Pendidikan karakter sebagai bentuk pembiasaan generasi muda untuk merefleksi diri atas pengalaman hidup, Pendidikan karakter sebagai bekal bagi generasi muda untuk menghadapi permasalahan dalam Masyarakat dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses membentuk karakter individu, yaitu: a)Faktor internal (kondisi fisik, kecerdasan peserta didik, minat, motivasi, bakat dan sikap, b)Faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah).

Soal Latihan

MC

Berikut makna dari Pendidikan karakter yaitu:

- Usaha dalam mendidik siswa agar dapat mengambil Keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari
- Peserta didik dapat menjadi trampil
- Mempunyai kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan
- Dapat menjadikan siswa mempunyai wawasan
- Siswa menjadi kreatif dan inovatif

MC

Berikut ini yang merupakan konsep dasar dari Pendidikan karakter?

- Menyampaikan pesan moral di setiap pembelajaran
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Mengajarkan sopan santun
- Memberi pemahaman untuk dapat bertoleransi dan menghargai
- menyiapkan jiwa sosial yang tinggi

MC

Berikut ini makna Kerja Keras dalam nilai pembentuk karakter?

- Mempunyai semangat yang berkobar
- Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
- Tanpa mengenal kata lelah untuk mencapai tujuan
- Mengejar Peluang tanpa mengenal kondisi
- Menikmati setiap naik dan turun perjuangan

MC

Berikut dampak positif dari pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia?

- Ijazah yang merupakan selembar kertas menjadi alat ukur keberhasilan individu
- Pendidikan karakter sebagai bentuk pembiasaan generasi muda untuk merefleksi diri atas pengalaman hidup
- Meningkatkan kinerja akademik.
- mengurangi stres
- memiliki disiplin tinggi

MC

Berikut faktor yang perlu diperhatikan dalam proses membentuk karakter dalam proses pendidikan?

- Dukungan Orang di Sekitar

- Kesalahan peran sekolah dalam mendidik
- Faktor internal (kondisi fisik, kecerdasan peserta didik, minat, motivasi, bakat dan sikap)
- Kemampuan belajar peserta didik.
- Semata-mata Pendidikan untuk kepentingan kelompok tertentu

BAB IX

(Pertemuan 13)

Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan Inklusi

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak setiap anak untuk mendapatkan dan mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan Inklusi. Komitmen itu pertama kali termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 yang disambut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan menerbitkan Surat Edaran No. 380/C.C6/MN/2003 pada tahun 2003 perihal pendidikan inklusi. Dalam rangka mempercepat perwujudan pendidikan inklusi, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 70 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti proses pendidikan dan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi wajib memberikan pelayanan khusus bagi siswa dengan kebutuhannya.

Menurut (Jannah dkk., 2021) pendidikan inklusi merupakan salah satu Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bermaksud untuk memberikan ruang bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki keistimewaan bakat serta kecerdasan untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang layak sebagaimana peserta didik reguler (PDR) dengan tidak memandang adanya perbedaan. Dengan adanya pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan antara Peserta Didik Reguler (PDR) dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) maka akan menciptakan korelasi yang interaktif untuk saling memahami satu sama lain, belajar saling mengerti, belajar saling menerima, menerima adanya perbedaan dengan maksud untuk meningkatkan sikap empati, simpati dan saling toleransi serta belajar untuk mampu bekerjasama satu sama lain.

Dikutip dari Buku Pendidikan Inklusif (Phytanza dkk., 2023) bahwa pada dasarnya sekolah Inklusif merupakan sekolah yang menerima seluruh peserta didik di dalam kelas yang kemudian menjadi bagian dari

kelas tersebut dan mendapatkan dukungan dari guru dan teman sebaya serta anggota masyarakat agar kebutuhan individualnya terpenuhi. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang secara resmi ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada tahun 1994 pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan, bahwa Prinsip mendasar dari Pendidikan Inklusif adalah “Selama memungkinkan, semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.”

Menurut (Mayya, 2019) Pendidikan Inklusi memiliki beberapa tujuan yang berfokus pada : 1) memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk mempercepat program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar; 2) mewujudkan peserta didik yang Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mandiri, mudah beradaptasi dan bermutu; 3) meningkatkan mutu pendidikan.

2. Model Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Menurut (Jannah dkk., 2021) Model-model Pembelajaran Pendidikan Inklusif yang disesuaikan dengan Tingkat kebutuhan peserta didik normal maupun berkebutuhan khusus ini meliputi :

- a. Model Kelas Reguler (Inklusif Penuh) yakni model pembelajaran yang menggabungkan Peserta Didik Reguler (PDR) dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan catatan bahwa Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) tidak mengalami gangguan intelektual yang signifikan. Dalam kelas ini semua peserta didik diperlakukan sama.
- b. Model *Cluster*, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri, namun tetap belajar secara bersama-sama dengan Peserta Didik Reguler (PDR) dalam satu kelas. Pada situasi ini, PDBK didampingi oleh Pendamping agar peserta didik tersebut dapat memperoleh pembelajaran yang layak sebagaimana Peserta Didik Reguler. Peran pendamping dalam model adalah memberikan pelayanan khusus ketika peserta didik (PDBK) mengalami kesulitan dan hambatan dalam belajarnya.
- c. Model *Pull Out*, Model Pull Out, model pembelajaran ini menempatkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di ruang tersendiri untuk memperoleh materi pelajaran tertentu dengan pendampingan khusus oleh guru khusus. Terdapat komponen-komponen tertentu dalam materi pelajaran yang memerlukan penyampaian secara khusus kepada Peserta

Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang disebabkan terjadinya ketimpangan apabila harus belajar bersama dengan peserta didik lainnya. Terdapat waktu khusus dimana Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dipindahkan dari kelas reguler untuk memperoleh pelayanan khusus dengan materi, strategi, metode serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

- d. Model Cluster and Pull Out, model pembelajaran gabungan antara model cluster dan model pull out. Sistem model pembelajaran ini pada waktu-waktu tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus. Kemudian di waktu-waktu lain Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) ditempatkan di kelas atau ruangan khusus untuk diberikan layanan khusus dengan materi, strategi, metode serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
- e. Model kelas khusus, model yang digunakan oleh sekolah yang mengadakan kelas khusus kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), akan tetapi terdapat aktivitas yang lain didalam pembelajaran tertentu semua peserta didik digabungkan dengan kelas reguler. Model ini merupakan model pembelajaran yang hanya menyediakan kelas bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) secara penuh tanpa adanya peserta didik normal sekalipun dalam satu kelas. Akan tetapi di waktu tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) digabungkan dengan Peserta Didik Reguler (PDR). Model kelas khusus ini memiliki keunikan tersendiri dimana kelas-kelas untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) berada di dalam kompleks yang sama dengan kelas reguler. model kelas khusus ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dapat berinteraksi dengan Peserta Didik Reguler (PDR) secara tidak langsung di dalam kelas dan berinteraksi secara langsung di luar kelas.
- f. Model Khusus Penuh, model yang digunakan sekolah yang mengadakan kelas khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Pembelajaran pada model ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar berbarengan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) lainnya secara full dan tidak bercampur dengan Peserta Didik Reguler (PDR), meskipun dilaksanakan di sekolah reguler.

Sedangkan menurut (Phytanza dkk., 2023) Model-Model pendidikan inklusif terbagi menjadi dua yaitu Pendidikan Inklusif Terpadu dan Model Pendidikan Inklusif Kolaboratif.

a) **Model Pendidikan Inklusif Terpadu**

Pendidikan Inklusif Terpadu merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas bagi setiap individu termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas. Konsep dasar model pendidikan inklusif terpadu ini merujuk pada pendekatan yang memadukan berbagai aspek pendidikan agar menjadi satu kesatuan yang seimbang dan holistik yang melibatkan perpaduan dari berbagai elemen dalam sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan seluruh siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Berikut beberapa konsep dasar yang terkait dengan model terpadu dalam pendidikan inklusif yaitu :

- 1) Kesetaraan dan Aksesibilitas, konsep ini menekankan pentingnya memberikan akses yang setara kepada seluruh siswa dengan tidak adanya diskriminasi atau hambatan yang menghalangi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa lainnya.
- 2) Kolaborasi dan Tim Kerja, mengutamakan kolaborasi antar penanggung jawab dalam pendidikan yakni guru, spesialis pendidikan khusus, orang tua dan siswa. Tim kerja ini bekerja sama untuk merancang dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh seluruh siswa.
- 3) Penyesuaian Individual, menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum, metode pengajaran dan sumber daya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang berbeda, bahan ajar yang sesuai dan perangkat teknologi yang mendukung.
- 4) Lingkungan yang mendukung, ini termasuk aksesibilitas fisik seperti fasilitas yang rama disabilitas dan lingkungan yang inklusif yang mendukung secara sosial.
- 5) Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia, ini mendasarkan model terpadu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi setiap siswa untuk menerima pendidikan tanpa adanya diskriminasi.
- 6) Pelatihan dan Pengembangan Profesional, yaitu memberikan pelatihan yang sesuai untuk mengajar di lingkungan yang inklusif kepada guru dan staf pendidikan sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan setiap siswa.

b) Model Pendidikan Inklusif Kolaboratif

Model Pendidikan Inklusif Kolaboratif merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan inklusif yang menekankan kolaborasi yang erat antara penanggung jawab kepentingan dalam pendidikan yaitu guru, spesialis pendidikan khusus, orang tua siswa dan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Prinsip-prinsip Kolaboratif dalam pendidikan inklusif merupakan dasar bagi pendekatan yang mendorong kerja sama antara penanggung jawab pendidikan. Prinsip ini antara lain: 1) Kesetaraan; 2) partisipasi aktif; 3) komunikasi terbuka; 4) transparansi. Prinsip-prinsip kolaboratif ini memberikan fokus pada evaluasi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan individu peserta didik sehingga pendidikan lebih efektif dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Implementasi Kolaborasi dalam ruang kelas dalam konteks pendidikan inklusif diantaranya yaitu:

- 1) Tim Kolaboratif, yakni Kerjasama antara guru dan spesialis pendidikan khusus untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melakukan evaluasi progress dan berbagi pengalaman,
- 2) Penyesuaian kurikulum, yakni dengan menyediakan bahan ajar alternatif, strategi pengajaran yang berbeda atau menyediakan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas,
- 3) Pembelajaran Diferensial, yakni guru menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan Tingkat kesiapan dan gaya belajar setiap siswa. Dalam hal ini guru perlu meningkatkan pemahaman yang baik mengenai karakteristik belajar masing-masing siswa,
- 4) Kolaborasi dengan orang tua, yakni guru dan orang tua melakukan komunikasi secara teratur untuk menggali masukan dan menambah pemahaman mengenai kebutuhan anak mereka. Dalam hal ini, orang tua menjadi mitra penting dalam merencanakan dan mendukung pembelajaran di rumah,
- 5) Penggunaan teknologi pendukung, yakni seperti perangkat lunak pembaca layar atau alat bantu komunikasi yang dapat digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran,
- 6) Pendekatan Pembelajaran Kolaboratif, yaitu guru mendorong interaksi dan Kerjasama antar siswa di dalam kelas,

- 7) Evaluasi berbasis kemajuan, yakni guru memantau progress secara teratur dan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan,
- 8) Pelatihan professional, yakni guru dan staf pendidikan menerima pelatihan yang sesuai untuk mengajar dalam lingkungan yang inklusif,
- 9) Dukungan dan sumber daya, yakni guru mempunyai akses untuk mendukung Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) termasuk dukungan yang diperlukan oleh spesialis dan peralatan yang diperlukan, dan
- 10) Pengembangan kesadaran, yaitu guru membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran mengenai keberagaman yang ada dan nilai-nilai inklusi melalui pembelajaran yang mendalam terkait dengan perbedaan budaya, sosial dan disabilitas.

3. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis dan landasan empiris yang kuat yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan pemikiran Mulyono Abdurrahman (2003) serta Irdamurni dan Rahmiati (2015).

a) Landasan Filosofis

Penerapan pendidikan Inklusif di Indonesia memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila yang juga mencakup prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pancasila mengakui keberagaman horizontal dan vertikal manusia serta misi bersama sebagai umat manusia di bumi. Keberagaman horizontal meliputi perbedaan suku bangsa, ras, agama, bahasa, budaya, tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan keberagaman vertikal meliputi beragamnya kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, dan sebagainya. Meskipun beragam, namun semua ini memiliki misi yang sama yaitu membangun kebersamaan dan interaksi yang didasari pada saling ketergantungan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menciptakan lingkungan untuk peserta didik dari berbagai latar belakang agar dapat berinteraksi dengan saling menghormati seperti yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan agama, termasuk islam menegaskan kesetaraan hak anak-anak dan semua makhluk di sisi Allah. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan memiliki potensi. Pandangan ini menekankan bahwa tidak ada dasar untuk membedakan individu

berdasarkan fisik dan kemampuan mereka. Contohnya dalam surat An-Nisa' (4-9) dan surat Al-Hujurat (11-13), terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya tidak mendiskriminasi atau merendahkan kelompok lain. Ayat dalam surat An-Nur (61) juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menghalangi orang-orang dengan berbagai kondisi untuk makan bersama dan berinteraksi. Allah tidak memandang perbedaan fisik atau kemampuan sebagai dasar diskriminasi. Dari perspektif keagamaan, semua makhluk Allah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif dipandang sebagai implementasi nilai-nilai filosofis dan agama yang mengakui kesetaraan, keberagaman, dan hak asasi manusia dalam pendidikan. Prinsip-prinsip ini membimbing penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

b) Landasan Yuridis

Penerapan pendidikan inklusif didasarkan pada landasan yuridis yang kuat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan di Indonesia, yang menegaskan hak setiap anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, diantaranya adalah:

1) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31

- Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."
- Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5

- Ayat (1): "Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
- Ayat (2): "Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."
- Ayat (3): "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus."
- Ayat (4): "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus."

3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 48: "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal selama 9 tahun untuk semua anak."
 - Pasal 49: "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan."
- 4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Pasal 5: "Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."
- 5) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 127-142)
- 6) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
- 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 "Menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya di 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK.
- 8) Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 8-14 Agustus 2004
- Menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam segala aspek kehidupan.
 - Menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan berkualitas, dan sesuai dengan potensi mereka tanpa diskriminasi.
 - Mendorong penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi anak berkebutuhan khusus secara optimal.
 - Meminimalkan hambatan dalam interaksi anak berkebutuhan khusus dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.
 - Mengedepankan kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif.

Selain itu, Adapun landasan yuridis secara Internasional dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:

- Tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Tahun 1989 dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak
- Tahun 1990 dalam Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk semua (Jomtien)
- Tahun 1993 dalam peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat
- Tahun 1994 dalam Pernyataan Salamanca di Spanyol
- Tahun 2000 dalam Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar)
- Tahun 2001 dalam Flagsihp PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan.

4. Prinsip Pendidikan Inklusif

Menurut Unesco (1994) bahwa Pendidikan kebutuhan khusus mengikuti prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang menguntungkan semua anak. Ini berarti pendidikan adalah proses normal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan sebaliknya, yaitu anak yang harus disesuaikan dengan kecepatan dan metode pembelajaran tertentu. Pendekatan yang berpusat pada anak ini bermanfaat untuk semua siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep dasar dalam Pendidikan Inklusif adalah tentang bagaimana memungkinkan setiap anak untuk belajar dan hidup bersama. Johnsen dan Skojen (2001) (x) menjelaskan tiga prinsip utama dalam pendidikan inklusif, yaitu:

- a) Setiap anak harus termasuk dalam komunitas setempat, kelas atau kelompok,
- b) Jadwal sekolah harus dirancang dengan penuh tugas pembelajaran yang kooperatif dengan memperhatikan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas dalam pemilihan metode pembelajaran,
- c) Guru bekerja sama untuk memahami tentang pendidikan umum, pendidikan khusus, Teknik belajar peserta didik, dan kebutuhan pelatihan untuk menghargai keragaman dan perbedaan peserta didik dalam pengorganisasian kelas.

Selanjutnya dikutip dari (Buku ajar) bahwa menurut (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, 2011) pendidikan inklusif diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

- a) Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu

Seharusnya anak mendapatkan kesempatan belajar bersama tanpa memandang kelainan ataupun perbedaan yang ada pada diri mereka. Filosofi dari pendidikan inklusif adalah adanya sebuah upaya untuk meratakan kesempatan dan mendapatkan layanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan.

b) Prinsip Keberagaman

Penyelenggaraan pendidikan sudah seharusnya didasarkan pada keragaman dan perbedaan peserta didik secara individual dari aspek kemampuan, bakat, minat dan kebutuhannya. Sekolah hendaknya mengenal, merespon kebutuhan siswa dan mengakomodasi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus secara tepat.

c) Prinsip Bermaknaan

Pendidikan Inklusif harus menciptakan lingkungan ekals dan sekolah yang ramah, kondusif dan bermakna agar dapat mengembangkan kemandirian peserta didik dengan cara Menyusun kurikulum yang tepat, melakukan pengorganisasian yang baik, memilih strategi pengajaran yang tepat serta memanfaatkan sumber daya dengan maksimal.

d) Prinsip Keberlanjutan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus dilakukan secara berkelanjutan baik pada jenjang sekolah Tingkat dasar, menengah, pendidikan tinggi, jalur formal, nonformal, informal dan berbagai jenis pendidikan lainnya, dan

e) Prinsip Keterlibatan

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan, keluarga, Masyarakat dan teman sebaya yang dapat mendukung berhasilnya pendidikan inklusif.

5. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusi

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu:

- a) Provokasi dan Sosialisasi
- b) Stuktur organisasi meliputi fungsi dan peran pelaksana
- c) Tenaga guru dalam mengelola kelasnya
- d) Peningkatan mutu pendidikan
- e) Sarana dan prasarana
- f) Kegiatan belajar mengajar yang efektif efisien
- g) Fleksibilitas kurikulum
- h) Identifikasi dan assesmen
- i) Kerjasama kemitraan.

Selain itu, terdapat faktor yang mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain :

- a) Sikap dan keyakinan yang positif, yaitu yakin bahwa pendidikan inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat berhasil. Keyakinan ini hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam pendidikan khusus untuk ABK, meliputi guru kelas, kepala sekolah yang bertanggung jawab atas hasil belajar ABK, seluruh staf dan siswa sekolah yang dipersiapkan untuk menerima ABK, Orang tua ABK yang mendukung program sekolah dan guru pendamping khusus yang memiliki komitmen dan mau berkolaborasi dengan guru reguler di kelas.
- b) Akses ke kurikulum dan lingkungan, kedua hal ini diatur agar dapat memenuhi kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, yang meliputi adanya program yang memfasilitasi Peserta didik tersebut seperti Orientasi Mandiri, Bina Diri, *Braille* dan sebagainya. Selanjutnya dengan tersedianya peralatan dan teknologi khusus yang dapat dimanfaatkan oleh ABK dan lingkungan fisik yang ramah bagi ABK (petunjuk tuna Netra dll).
- c) Dukungan sistem, yakni seperti tersedianya personel dalam jumlah yang cukup (guru pendamping dan tenaga pendukung lainnya), terdapat adanya pengembangan staf dan pemberian bantuan teknis yang berdasar pada kebutuhan personel sekolah dan adanya kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap ABK (asesmen dan evaluasi).
- d) Metode Mengajar, guru hendaknya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas. Maka, guru harus memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai, mampu berkolaborasi dengan guru pendamping khusus agar bisa memberikan layanan pembelajaran untuk PDBK yang meliputi *Team Teaching*, *Peer Tutoring*, *Teacher Assistance Team*, dan menyiapkan program individual untuk PDBK lainnya.

Rangkuman

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 70 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti proses pendidikan dan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi merupakan salah satu Lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dengan maksud untuk memberikan ruang bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki keistimewaan bakat serta kecerdasan untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang layak sebagaimana peserta didik reguler (PDR) dengan tidak memandang adanya perbedaan. Prinsip mendasar dari Pendidikan Inklusif adalah “Selama memungkinkan, semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka”. Ada beberapa tujuan yang berfokus pada : 1) memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk mempercepat program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar; 2) mewujudkan peserta didik yang Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mandiri, mudah beradaptasi dan bermutu; 3) meningkatkan mutu pendidikan. Model-model Pembelajaran Pendidikan Inklusif yaitu Model Pendidikan Inklusif Terpadu dan Model Pendidikan Inklusif Kolaboratif. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis dan landasan empiris yang kuat yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu: a) Provokasi dan Sosialisasi, b) Struktur organisasi meliputi fungsi dan peran pelaksana, c) Tenaga guru dalam mengelola kelasnya, d) Peningkatan mutu Pendidikan, e) Sarana dan prasarana, f) Kegiatan belajar mengajar yang efektif efisien, g) Fleksibilitas kurikulum, h) Identifikasi dan assesmen, i) Kerjasama kemitraan. Selain itu, terdapat faktor yang mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain: a) Sikap dan keyakinan yang positif, b) Akses ke kurikulum dan lingkungan, c) Dukungan system, d) Metode Mengajar.

Soal Latihan

MC

Berikut makna Pendidikan Inklusi menurut Permendiknas No 70 Tahun 2009?

- Lembaga pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti proses pendidikan dan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- Usaha dalam mendidik siswa agar dapat mengambil Keputusan dengan bijak.
- Mempunyai kemampuan dalam mengambil sebuah Keputusan.
- Dapat menjadikan siswa mempunyai wawasan.
- Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

MC

Berikut maksud dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan inklusi?

- Menyampaikan pesan moral di setiap pembelajaran
- Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya
- Memberi pemahaman untuk dapat bertoleransi dan menghargai
- Menyiapkan jiwa sosial yang tinggi
- Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran

MC

Berikut ini Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif kecuali?

- Model campuran
- Model Pendidikan Inklusif Terpadu
- Model Pendidikan Inklusif Kolaboratif
- Model Kelas Reguler
- Model Cluster and Pull Out

MC

Berikut makna dari landasan filosofis pada penyelenggaraan Pendidikan inklusif?

- Ijazah yang merupakan selebar kertas menjadi alat ukur keberhasilan individu

- Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika.
- Berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik.
- Memberikan kesempatan seluruh peserta didik
- Menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran

MC

Berikut faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif?

- Dukungan Orang di Sekitar
- Kesalahan peran sekolah dalam mendidik
- Tenaga guru dalam mengelola kelasnya
- Kemampuan belajar peserta didik.
- sistem penyelenggaraan pendidikan

BAB X

(Pertemuan 14)

Analisis Kebijakan Pendidikan Vokasional

A. Pengertian Pendidikan Vokasional

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan dalam 3 jenis pendidikan, yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi/Ahli. Pendidikan Akademik merupakan sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan vokasi adalah pendidikan mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), dan Diploma IV (D4). Pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi/keahlian tertentu.

Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Secara khusus, program diploma III diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara mandiri, hal ini karena beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.

Menurut (Daryanto, dkk, 2018) pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang luarannya menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian menurut (Verawadina, 2019) menyatakan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki

keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dunia kerja memiliki keterkaitan dengan perkembangan pendidikan vokasi yang disebabkan oleh adanya perubahan teknologi, perubahan organisasi pekerjaan, dan perubahan kompetensi.

Sedangkan menurut (Sutarna, 2020) pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Selanjutnya menurut (Sukoco, 2019) program vokasi merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. Sehingga lebih memiliki kesiapan kerja bagi individu dalam rangka memasuki dunia kerja (Samsun, 2024).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berfokus pada keahlian dan keterampilan peserta didik guna menjadi lulusan yang siap bekerja sesuai dengan bidang yang peserta didik pelajari. Terdapat kebijakan dalam menerapkan pendidikan vokasional, seperti yang dijelaskan oleh (Lukum, dkk, 2023) kebijakan pendidikan vokasional bertujuan untuk menyediakan pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan memenuhi kebutuhan industri. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan kejuruan yang umum diterapkan:

1. Pembentukan Kurikulum yang Relevan

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Kurikulum kejuruan harus mencakup keterampilan teknis, pengetahuan praktis, dan keterampilan softskill yang diperlukan oleh para pekerja di bidang tertentu.

2. Program Magang dan Kerja Praktik

Pemerintah dapat mendorong program magang dan kerja praktek yang menghubungkan siswa dengan dunia industri. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan praktis, dan memperluas jaringan profesional mereka.

3. Sertifikasi Profesi dan Standar Kompetensi

Kebijakan ini bertujuan untuk mengakui dan menghargai keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan. Pemerintah dapat menetapkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional, sehingga meningkatkan pengakuan dan mobilitas tenaga kerja kejuruan.

4. Kerja Sama dengan Industri

Kebijakan ini mendorong kerja sama aktif antara lembaga pendidikan kejuruan dengan industri. Hal ini melibatkan pengembangan kurikulum berbasis industri, penyediaan fasilitas dan peralatan yang relevan, serta kolaborasi dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.

5. Pembangunan Lembaga Pendidikan Kejuruan

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan lembaga pendidikan kejuruan yang berkualitas dan modern. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan bagi staf pengajar, peningkatan fasilitas, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran kejuruan.

6. Promosi dan Informasi Karir

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan informasi tentang pilihan karir di bidang kejuruan. Pemerintah dapat mengadakan program promosi karir, penyediaan informasi tentang peluang pekerjaan, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia informasi karir. Kebijakan pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, meningkatkan kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai sektor industri.

B. Tujuan Pendidikan Vokasional

Mengingat kebutuhan skill pada abad ke-21, dunia pekerjaan yang harus mengikuti perkembangan digital dimana teknologi informasi dan komunikasi semakin maju pesat. Maka tujuan pendidikan vokasional juga berkembang mengikuti tuntutan era modern. Menurut (Sudira, 2018) tujuan pendidikan vokasional pada dewasa ini diarahkan untuk dapat memenuhi lima tuntutan pokok, yakni sebagai berikut.

1. Melakukan enkulturasi (perubahan) dan akulturasi (penyesuaian) budaya masyarakat untuk belajar memecahkan masalah secara kreatif dan transformatif berbasis budaya tekno- sains-sosio-kultural. Di masyarakat secara sosio dialogis bertumbuh kembang kultur hidup pemecahan masalah berbasis sains (eksplansi) dan teknologi (disain-rekayasa) sebagai proses pemeliharaan keberlangsungan hidup bangsa, negara, dan masyarakat.
2. Mengembangkan kapabilitas kompetensi/skill, tata nilai, norma, mental, budaya kerja masyarakat peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pantas, baik, sopan (decent work), dan peningkatan posisi karir (career skills) di tempat kerja sehingga mandiri dalam berkesejahteraan sebagai proses pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi dan efisiensi sosial. Pembelajaran vokasional akan efektif jika secara sosial efisien mewujudkan kapabilitas kerja dan karir.
3. Terampil menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup (life skills) diri pribadinya dalam berinteraksi di dunia kerja, keluarga, dan masyarakat sebagai dharma negara
4. Terampil belajar (learning skills) disepanjang hayat ditandai dengan meningkatnya kreativitas berpikir, bekerja kreatif dengan orang lain, dan menerapkan inovasi dalam kehidupan nyata yang dijalani;
5. Terampil menggunakan teknologi, multimedia, dan sistem informasi menuju literasi digital;

Kelima tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak boleh ada yang terabaikan atau terlupakan. Pembelajaran vokasional memberikan bekal pengalaman pendidikan dan keterampilan kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik dan layak serta memperoleh penghargaan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan pekerjaan.

Sedangkan menurut (Puri, dkk, 2023) visi pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan yang mudah terserap di pasar tenaga kerja tidak terlepas dari tujuan penciptaan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi melalui kurikulum pendidikan vokasi. Adapun menurut (Sutarna, dkk, 2020) dalam buku Manajemen Pendidikan Vokasi. Tujuan pendidikan vokasi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas- luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia mempersiapkan diri untuk bekerja dengan keahlian terapan yang diminatinya;
2. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidang keahlian dan pekerjaan yang akan ditekuninya;
3. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga yang mempunyai keterampilan dan siap untuk memasuki pasar kerja.
4. Memberikan akses dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan serta mengikuti penyelenggaraan pendidikan vokasi;
5. Menawarkan beberapa alternative atau pilihan selain pendidikan akademik dan profesi kepada masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan.

Disisi lain, berdasarkan Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; tujuan pendidikan kejuruan/vokasi secara spesifik adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan peserta didik untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengembangkan keahlian dan keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi, memiliki etos kerja tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri. Rumusan tersebut mempunyai makna bahwa tugas pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, mampu mandiri membuka usaha, mampu beradaptasi dengan cepat sesuai tuntutan teknologi, dan mampu berkompetisi. Secara substansial pendidikan kejuruan bertugas membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan, wawasan, dan keterampilan di bidang industri yang baik, dan menguasai konsep-konsep engineering di industri. Pendidikan vokasional umumnya diartikan sebagai bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap suatu bidang atau suatu profesi tertentu.

C. Perbedaan Vokasi dan Sarjana

Pendidikan vokasi (sering juga disebut sebagai pendidikan kejuruan) adalah pendidikan yang menekankan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Biasanya satu program

membahas topik yang spesifik. Misalnya: Seni Kuliner Prancis: Patisserie, Multimedia: Character Design, dan lain sebagainya yang benar-benar membutuhkan keahlian praktikal. Pendidikan vokasi biasanya mengharuskan mahasiswa untuk magang, sebelum menamatkan program pilihan mereka. Mahasiswa pendidikan vokasi biasanya lulus dengan gelar Certificate, Diploma atau Advanced Diploma. Banyak juga gelar vokasi yang dapat dilanjutkan kependidikan tingkat sarjana atau pasca sarjana. Durasi pendidikan vokasi sangat bervariasi, mulai dari satu semester, hingga beberapa tahun, tergantung program yang dipilih.

Pendidikan vokasi benar-benar melatih keahlian praktikal, sehingga tentu saja lebih banyak praktek dari pada teori. Berbeda dengan pendidikan gelar sarjana dan sebagainya, pendidikan vokasi ditawarkan lebih banyak institusi, baik itu universitas, kolese, politeknik, pusat pelatihan ataupun institusi-institusi lainnya yang berspesialisasi menyelenggarakan program pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi cocok bagi mereka yang sudah jelas dan yakin dengan apa yang ingin mereka kejar sebagai karir masa depan. Banyak sekali bidang yang tersedia mulai dari pariwisata dan perhotelan, manajemen retail, pengembangan software, desain interior, teknik otomotif, penata rambut hingga kuliner. Pendidikan vokasi menekankan keahlian praktikal yang dibutuhkan untuk terjun langsung keindustri serta membahas topik yang lebih spesifik, jika dibandingkan dengan perkuliahan di universitas yang membahas topik yang lebih luas.

Adapun menurut (Kemenperin, 2018) perbedaan vokasi dan sarjana dapat dilihat dari 6 aspek, diantaranya:

1. Gelar yang Didapat

Tentunya gelar alumni akan berbeda antara vokasi dan sarjana. Untuk alumni pendidikan vokasi D1 akan bergelar Ahli Pratama (A.P.); D2 akan bergelar Ahli Muda Pendidikan (A.Ma.); D3 bergelar Ahli Madya (A.Md.); dan D4 bergelar Sarjana Terapan (S.Ter.). Sedangkan untuk sarjana, masing-masing jenjang pun memiliki gelar yang berbeda, S1 dengan Sarjana, S2 dengan Magister, dan S3 dengan gelar Doktor di depan nama.

2. Tujuan Pendidikan

Perbedaan vokasi dan sarjana lainnya terletak pada tujuan pendidikan itu sendiri. Pada vokasi, mahasiswa diajarkan dan dipersiapkan untuk langsung bekerja dengan banyaknya praktik di bidang studi yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian siap kerja. Sedangkan pada sarjana lebih mengedepankan penerapan disiplin ilmu. Kemudian untuk praktiknya, mahasiswa dapat mempelajarinya saat magang.

3. Kurikulum pendidikan

Kurikulum yang diterapkan pada vokasi dan sarjana memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat dilihat dari komposisi kurikulumnya. Pada pendidikan vokasi menerapkan 60% praktik dan 40% teori. Sedangkan pada pendidikan sarjana menerapkan 60% teori dan 40% praktik.

4. Jangka Waktu Pendidikan

Selain poin-poin di atas, jangka waktu pengambilan studi pun juga berbeda antara vokasi dan sarjana. Masa studi vokasi terbilang lebih singkat dibandingkan dengan sarjana. Untuk vokasi, jangka waktu pendidikan antara 1-4 tahun tergantung jenjang yang dipilih. Yakni dengan rincian studi dalam 1 tahun untuk D1, 2 tahun untuk D2, 3 tahun untuk D3, dan 4 tahun untuk D4. Sedangkan untuk sarjana, paling cepat menghabiskan 3,5 tahun untuk S1, 1-2 tahun untuk S2 dan untuk S3 bisa bervariasi mulai dari 3-7 tahun. Beberapa program sarjana juga memiliki program profesi, seperti kedokteran gigi, farmasi, dan sebagainya.

5. Peluang Studi Lanjut

Bagi sebagian orang, peluang studi lanjut juga merupakan aspek penting dalam penentuan pengambilan program studi. Perbedaan vokasi dan sarjana ini terletak pada tingkatannya. Untuk vokasi, setelah menyelesaikan studi D4, mahasiswa bisa melanjutkan studi pendidikan ke magister karena D4 sudah bergelar Sarjana Terapan, sehingga memungkinkan untuk langsung meneruskan ke S2. Mahasiswa tidak perlu khawatir karena ada banyak Lembaga yang menerima pengambilan pendidikan S2 dari lulusan D4. Lain halnya jika mahasiswa mengambil D3, mahasiswa tersebut harus meneruskan ke S1 terlebih dahulu. Sedangkan untuk program sarjana, mahasiswa bisa langsung meneruskan pendidikan ke jenjang magister.

6. Prospek Kerja

Prospek kerja wajib diperhitungkan karena hal inilah yang akan menjadi tolak ukur pengambilan pendidikan. Perbedaan vokasi dan sarjana dalam hal prospek kerja jelaslah berbeda mengingat kurikulum pendidikan yang diterapkan berbeda. Dari kurikulumnya, pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada ilmu praktikum sudah mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, prospek kerja pun akan sangat luas, khususnya bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian. Sedangkan untuk sarjana, prospek karir lebih besar dibandingkan prospek kerja karena banyaknya peluang menjadi konseptor di suatu bidang yang khususnya masih berkaitan dengan teori dan ilmu studi perkuliahan.

D. Manfaat Pendidikan Vokasional

Menurut (Sudira, 2018) pendidikan vokasional abad 21 yang efektif akan memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara yang menuju negara maju amat penting memperhatikan perkembangan kualitas pembelajaran vokasional. Manfaat umum dari pembelajaran vokasional Abad diantaranya adalah: (1) peningkatan kualitas human capital (skill, tingkat pendidikan, kesiapan dan kesehatan) tenaga kerja; (2) penguatan kompetensi kerja melalui berbagai pengalaman belajar kerja; (3) pengentasan kemiskinan; (4) peningkatan kesejahteraan; (5) pengurangan pengangguran; (6) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); (7) pengembangan keunggulan/kearifan lokal; (8) penarikan investasi asing; (9) konservasi budaya, lingkungan sosial, dan alam; (10) peningkatan kualitas transisi dari sekolah ke dunia kerja. Adapun manfaat khusus pembelajaran vokasional sebagai proses pengembangan tenaga kerja Indonesia antara lain:

1. Secara sosio kultural menjaga keberlangsungan pekerjaan- pekerjaan esensial yang ada di masyarakat (bertani, berladang, beternak, menari, menabuh, dll.) dan kearifan serta keunggulan lokal melalui transformasi dan inovasi cara-cara kerja yang baru;
2. Secara sosio ekonomi dapat mengembangkan kapasitas dan keberlangsungan pembangunan industri, informasi, layanan umum, layanan sosial, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
3. Memenuhi kebutuhan keberlangsungan kerja dan perluasan kerja bagi pekerja;

4. Menjaga keberlangsungan dan transformasi sosial tentang norma-norma, nilai kebangsaan, kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan;
5. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia sebagai human capital;
6. Meningkatkan kreativitas dan daya saing masyarakat dalam membangun kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran;
7. Meningkatkan kesiapan warga masyarakat dalam bekerja; persyaratan pekerjaan;
8. Meningkatkan kualitas produksi dan layanan di dunia kerja;
9. Meningkatkan kapabilitas masyarakat sebagai entrepreneur

Human capital yang memiliki skill, sertifikat kompetensi, status pendidikan dan kesehatan yang baik, kompetensi kerja terstandar industri dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah pembelajaran vokasional yang efektif menghasilkan tenaga kerja penuh skill merupakan modal untuk penarikan investasi asing yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konservasi budaya, alam, flora, dan fauna juga penting dijaga melalui pembelajaran vokasional agar pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan memberi kebermanfaatn yang berkelanjutan.

Rangkuman

Pendidikan vokasi adalah pendidikan mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), dan Diploma IV (D4). Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan vokasi dimaknai merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Artinya pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berfokus pada keahlian dan keterampilan peserta didik guna menjadi lulusan yang siap bekerja sesuai dengan bidang yang peserta didik pelajari. Berikut kebijakan pendidikan kejuruan yang umum diterapkan; a) Pembentukan Kurikulum yang Relevan, b) Program Magang dan Kerja Praktik, c) Sertifikasi Profesi dan Standar Kompetensi, d) Kerja Sama dengan Industri, e) Pembangunan Lembaga Pendidikan Kejuruan, f) Promosi dan Informasi Karir. Ada lima tuntutan pokok tujuan pendidikan vokasional adalah sebagai berikut; 1)Melakukan enkulturasi (perubahan) dan akulturasi (penyesuaian) budaya masyarakat untuk belajar memecahkan masalah secara kreatif dan transformatif berbasis budaya tekno- sains-sosio-kultural, 2)Mengembangkan kapabilitas kompetensi/skill, tata nilai, norma, mental, budaya kerja masyarakat peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pantas, baik, sopan (decent work), dan peningkatan posisi karir (career skills) di tempat kerja sehingga mandiri, 3)Terampil menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup (life skills), 4)Terampil belajar (learning skills) disepanjang hayat ditandai dengan meningkatnya kreativitas berpikir, bekerja kreatif dengan orang lain, 5)Terampil menggunakan teknologi, multimedia, dan sistem informasi menuju literasi digital. Ada 6 aspek perbedaan vokasi dan sarjana seperti: Gelar yang didapat; kurikulum pendidikan; tujuan pendidikan; Jangka Waktu Pendidikan; Peluang Studi Lanjut; dan prospek kerja. Ada beberapa manfaat secara umum dari pembelajaran vokasional (1) peningkatan kualitas human capital (skill, tingkat pendidikan, kesiapan dan kesehatan) tenaga kerja; (2) penguatan kompetensi kerja melalui berbagai pengalaman belajar kerja; (3) pengentasan kemiskinan; (4) peningkatan kesejahteraan; (5) pengurangan pengangguran; (6) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); (7) pengembangan keunggulan/kearifan lokal; (8) penarikan investasi asing; (9) konservasi

budaya, lingkungan sosial, dan alam; (10) peningkatan kualitas transisi dari sekolah ke dunia kerja.

Soal Latihan

MC

Berikut tujuan pendidikan vokasi (program diploma) secara umum?

- Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi
- Memiliki peluang tinggi untuk bekerja.
- Melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- Menawarkan pendidikan yang lebih luas dan umum.
- Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

MC

Berikut makna dari pendidikan vokasi?

- Menyiapkan peserta didik yang bermoral
- Pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja
- Memberi pemahaman untuk dapat bertoleransi dan menghargai
- Menyiapkan jiwa sosial yang tinggi
- berorientasi pada akademik ketimbang praktik

MC

Berikut tujuan pendidikan vokasional yang harus termuat dalam visi misi?

- Melakukan enkulturasi (perubahan) dan akulturasi (penyesuaian) budaya masyarakat untuk belajar memecahkan masalah secara kreatif dan transformatif berbasis budaya tekno-sains-sosio-kultural.
- Menawarkan pendidikan yang lebih luas dan umum
- menawarkan pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu
- tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan studi lanjut
- Pendidikan vokasi tergolong pendidikan mahal

MC

Terdapat beberapa aspek perbedaan pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana sarjana kecuali?

- Gelar yang didapat
- Kurikulum pendidikan
- Tujuan pendidikan dan Jangka Waktu Pendidikan
- Peluang Studi Lanjut dan prospek kerja
- Berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik.

MC

Berikut manfaat secara umum pembelajaran vokasional?

- Dilihat dari pengembangan karir seseorang
- Peningkatan kualitas human capital (skill, tingkat pendidikan, kesiapan dan kesehatan) tenaga kerja
- Tidak fokus pada penguasaan hard skill untuk dunia kerja
- Berorientasi pada peningkatan pengetahuan bukan keterampilan
- Menyediakan kebutuhan perusahaan penyedia lapangan kerja

BAB XI

(Pertemuan 15)

Analisis Kebijakan Kurikulum MBKM

A. Pengertian Kurikulum MBKM

Dalam penyelenggaraan pendidikan membutuhkan suatu kurikulum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan karena kurikulum adalah ruh yang menjadi penggerak sistem pendidikan. Seiring dengan proses pendidikan yang telah berjalan, kurikulum mengalami pergantian mulai dari KTSP, K13 dan hingga saat ini Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Konsep Merdeka Belajar dipilih karena terinspirasi dengan Filsafat K.H Dewantara yang bermakna Kemerdekaan dan Kemandirian.

Merdeka dapat diberlakukan bagi pendidik untuk bebas memilih metode pengajaran yang tepat untuk peserta didik di kelas dan Merdeka untuk memilih elemen-elemen yang terbaik dalam kurikulum. Kebijakan “MBKM” adalah salah satu Keputusan pemerintah untuk memperbaiki sistem dan metode pembelajaran di Indonesia, terkhusus perguruan tinggi untuk siap dan mampu bersaing secara global terutama dalam dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim, yang mana terdapat dua konsep yang sangat penting dalam “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”. Konsep yang pertama adalah Merdeka Belajar yang berarti bahwa adanya “Kemerdekaan berpikir”. Menurut Nadiem Anwar Makarim, kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dahulu oleh para pendidik sebagai upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di sekolah. Konsep yang kedua adalah “Kampus Merdeka” yang merupakan kelanjutan dari konsep “Merdeka Belajar” sebagai upaya untuk melepaskan belenggu agar dapat bergerak lebih mudah (Mumtahanah dkk., 2023).

Selanjutnya menurut (Irawan & Suharyati, 2023) MBKM adalah suatu sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri serta dunia usaha untuk berbagi pengalaman kepada mahasiswa dan dosen sebagai *stake holder* di perguruan tinggi. Pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi telah memberikan kebijakan terkait dengan tuntutan dari MBKM untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kompetensi capaian pembelajaran lulusan, baik soft skills maupun

hard skills, dengan mempersiapkan akan lulusan dimasa depan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman yang memiliki kepribadian yang baik sehingga capaian lulusan dari perguruan tinggi dapat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan demikian berdasarkan filosofi dan cita-cita luhur dari kebijakan MBKM diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa. Pokok dalam kebijakan MBKM adalah tentang Program Studi baru mengenai pendirian, perubahan dan pembubaran PTN serta pencabutan izin PTS. Ada beberapa hal yang termasuk dalam MBKM, yakni magang, pertukaran pelajar, penelitian, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek *independent* dan membangun desa.

Dikutip dari *website* kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, berikut jenis-jenis kegiatan yang tersedia di Program Kampus Merdeka, yaitu :

1. Magang Bersertifikat (MSIB) merupakan program Magang yang diawasi langsung oleh Kemendikbudristek selama 1 (satu) semester untuk mendapatkan pengalaman kerja dan pengetahuan tentang praktik terbaik dari industri yang diminati oleh mahasiswa. Keuntungan dari mengikuti program ini adalah mahasiswa mendapatkan Bantuan Biaya Hidup (BBH), mobilisasi/travel dan mentorship.
2. Studi Independent, adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari kompetensi yang spesifik dan praktis secara langsung dari pakarnya selama 1 (satu) semester melalui aktivitas pembelajaran dan praktik langsung.
3. Kampus Mengajar, merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan.
4. *Indonesian International Student Mobility* (IISMA), yaitu program pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa universitas lain dari seluruh dunia untuk bertukar budaya.
5. Pertukaran Mahasiswa Merdeka, merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang memberikan pengalaman langsung untuk lebih memaknai keberagaman budaya Nusantara.
6. Praktisi Mengajar, merupakan ruang kolaborasi antara Praktisi sebagai representasi industri dengan dosen Perguruan Tinggi dalam bentuk

Pengajaran mata kuliah agar mahasiswa lebih siap untuk masuk ke dunia kerja.

7. Wirausaha, merupakan program untuk meningkatkan kemampuan wirausaha.

Pengalaman mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka sangat besar pengaruhnya bagi kesiapan karir mahasiswa dengan cara memastikan mahasiswa terus memantau perubahan dunia luar kampus selama berkuliah dan mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu tersebut pada masalah di dunia nyata.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi dengan dinamika permasalahan yang dihadapi, maka dapat perguruan tinggi hendaknya:

- a) Merevisi struktur kurikulum untuk disesuaikan dan diorientasikan pada kebijakan Merdeka belajar mahasiswa,
- b) Menyusun pedoman akademik meliputi Kalender Akademik yang merumuskan gambaran teori dan praktek serta *timing* (waktu) pelaksanaannya,
- c) Melakukan MoU (Kerjasama) dengan berbagai pihak (perguruan tinggi negeri/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri), pemerintah, Masyarakat, Lembaga penelitian, Perusahaan, organisasi kemanusiaan, dsb
- d) Mengelompokkan mata kuliah untuk 2 semester (setara dengan 40 SKS) yang berkorelasi dengan dunia kerja sebagai bentuk pengalaman profesi dan tempat belajar di luar kampus,
- e) Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang akan menjadi mitra kampus dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut,
- f) Menyesuaikan instrument pembelajaran seperti kontrak belajar, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, jurnal perkuliahan, format evaluasi pembelajaran dan sebagainya yang menggambarkan target pencapaian pembelajaran,
- g) Adanya penyesuaian dokumen meliputi Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dokumen monitoring supervisi atau evaluasi terhadap sistem dan format penilaian seiring pelaksanaan Kebijakan MBKM, dan
- h) Menyesuaikan anggaran pendidikan terutama yang berkaitan dengan praktek diluar kampus selama 2 semester (landasan filosofis)

1. Tujuan Kebijakan MBKM

Program MBKM adalah revolusi pendidikan yang didasarkan pada perkembangan industry 4.0. Kebijakan MBKM diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 15-18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di program studi atau di luar kampus. Kebijakan MBKM bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berdaya saing; ini berarti bahwa manusia sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, produktif, bermatabat, produktif dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan hadirnya kebijakan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu *softskills* maupun *hardskills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, mempersiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian (Mumtahanah et al., 2023).

Menurut (Irawan & Suharyati, 2023) tujuan dari diberlakukannya MBKM adalah untuk memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi dalam mengembangkan kompetensi mahasiswanya untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang baik itu di bidang akademik, *softskills* dan *hardskills*. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*students centered learning*) adalah salah satu perwujudan proses pembelajaran dalam MBKM yang sangat esensial. Metode yang diterapkan dalam MBKM ini sangat mendorong kreativitas mahasiswa dengan berbagai program kegiatan yang ada meliputi Pertukaran Pelajar, Wirausaha, magang dan sebagainya (Rizal dkk., 2023).

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari MBKM adalah untuk menyiapkan lulusan dari Perguruan Tinggi yang memiliki kemampuan *softskills* dan *hardskills* yang matang dan sesuai dengan kebutuhan zaman agar dapat meminimalisir angka sarjana yang menganggur di Indonesia melalui program-program *experiental learning* dengan jalur yang fleksibel.

2. Manfaat Ikut Program Kampus Merdeka

Apabila implementasi MBKM (Kampus Merdeka) berjalan dengan baik dan sukses, berkelanjutan dan terjamin mutunya akan ada banyak sekali pihak yang merasakan manfaatnya, mulai dari Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa dan Mitra dunia kerja.

Bagi mahasiswa, manfaat ikut program Kampus Merdeka ini adalah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendalami minat dan bakat selama menjalani pendidikan di Program Studi, selain itu juga

mendapatkan keterampilan kerja khusus dan *softskills* yang relevan untuk memasuki Masyarakat informasi dan industry 4.4.

Manfaat bagi dosen adalah dapat meningkatkan kompetensi pedagogi dan penguasaan substansi pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi dunia kerja adalah dapat memberikan manfaat berupa tenaga kerja yang dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin di masa depan yang terampil dalam menjalankan pekerjaan.

Kelebihan dari hadirnya Kebijakan MBKM adalah terdapat pada poin hak belajar tiga semester diluar program studi bagi mahasiswa sehingga dapat menemukan bidang ilmu mana yang sesuai dengan passionnya (Siregar dkk., 2020).

3. Kebijakan Kampus Merdeka A/a Nadiem Makarim

Kebijakan Kampus Merdeka ditujukan bagi lingkup Perguruan Tinggi yang merupakan tahap awal untuk melepas belenggu agar lebih mudah untuk bergerak. Kampus Merdeka merupakan lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Terdapat empat poin yang menjadi program utama Kebijakan Kampus Merdeka bagi Perguruan Tinggi A/a Nadiem Makarim, yaitu:

- a) Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pembukaan atau mendirikan program studi baru. Otonomi akan diberikan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Selanjutnya, perguruan tinggi tersebut telah melakukan Kerjasama dengan organisasi atau univertitas yang termasuk dalam QS Top 100 *World Universities*. Kerjasama berbentuk penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa,
- b) Program re-akreditasi secara otomatis dan sukarela. Program ini bersifat otomatis bagi semua peringkat dan bersifat sukarela bila perguruan tinggi atau prodi telah siap untuk naik peringkat. Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan Kembali dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Bagi perguruan tinggi atau prodi yang telah memperoleh akreditasi A, maka diberikan kesempatan untuk memperoleh akreditasi Internasional,
- c) Syarat menjadi PTN-BH dipermudah. Kebebasan bagi perguruan tinggi negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Kemdikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi

PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Untuk saat ini hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN BH,

- d) Hak belajar selama tiga semester di luar program studi dan Perubahan definisi SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarela mengambil atau tidak di luar perguruan tingginya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampus sebanyak satu semester. Setiap SKS diartikan sebagai “Jam Kegiatan” bukan lagi “Jam Belajar”. Kegiatan ini bisa berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian Masyarakat, riset, studi independent, wirausaha atau kegiatan mengajar di daerah terpencil. Kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau juga program yang disetujui oleh rektornya. Setiap program yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan.

Hak belajar tiga semester yang dimaksud disini adalah menyiapkan kompetensi mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial budaya, dunia industri dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Hal ini dilakukan karena kompetensi mahasiswa harus disesuaikan dengan dunia kerja serta masa depan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

- a) Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi maupun di luar program studi,
- b) Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan pembelajaran yang juga terdiri dari pembelajaran pada Lembaga non-perguruan tinggi,
- c) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester,
- d) Proses pembelajaran di luar program studi ditentukan oleh Kementrian dan/atau pemimpin perguruan tinggi,
- e) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen,
- f) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Kehadiran Kebijakan MBKM memberikan banyak kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keilmuan di perguruan tinggi secara fleksibel yang tidak hanya mengharuskan duduk di kelas untuk mengikuti perkuliahan, namun juga mendapatkan ilmu dan keterampilan sesuai kompetensinya melalui program-program yang dikembangkan oleh beberapa mitra yang ada di luar kampus.

Dikutip dari (Maulana, 2022) bahwa Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela untuk mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah juga dengan mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Pembelajaran MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Hal ini dilakukan agar *hardskill* dan *softskill* mahasiswa terbentuk dengan kuat.

Rangkuman

Seiring dengan proses pendidikan yang telah berjalan, kurikulum mengalami pergantian mulai dari KTSP, K13 dan hingga saat ini Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Konsep Merdeka Belajar dipilih karena terinspirasi dengan Filsafat K.H Dewantara yang bermakna Kemerdekaan dan Kemandirian. Kebijakan “MBKM” adalah salah satu Keputusan pemerintah untuk memperbaiki sistem dan metode pembelajaran di Indonesia, terkhusus perguruan tinggi untuk siap dan mampu bersaing secara global untuk mengisi dunia kerja. MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim, dengan dua konsep dalam pelaksanaan “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka”, pertama adalah Merdeka Belajar yang berarti bahwa adanya “Kemerdekaan berpikir dimulai dari para pendidik sebagai upaya menghormati perubahan dalam pembelajaran di sekolah, ke kedua adalah “Kampus Merdeka” kelanjutan dari konsep “Merdeka Belajar” sebagai upaya untuk melepaskan belenggu agar dapat bergerak lebih mudah. Ada beberapa program dalam

MBKM, yakni magang, pertukaran pelajar, penelitian, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent dan membangun desa. Dampak dari kebijakan Pemerintah tentang MBKM di Perguruan Tinggi adalah: a) Merevisi struktur kurikulum untuk disesuaikan dan diorientasikan pada kebijakan Merdeka belajar mahasiswa, b) Menyusun pedoman akademik meliputi Kalender Akademik yang merumuskan gambaran teori dan praktek serta timing (waktu) pelaksanaannya, c) Melakukan MoU (Kerjasama) dengan berbagai pihak (perguruan tinggi negeri/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri), d) Mengelompokkan mata kuliah untuk 2 semester (setara dengan 40 SKS) yang berkorelasi dengan dunia kerja, e) Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang akan menjadi mitra kampus dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut, f) Menyesuaikan instrument pembelajaran seperti kontrak belajar, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, jurnal perkuliahan, format evaluasi pembelajaran, g) Adanya penyesuaian dokumen meliputi Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), h) Menyesuaikan anggaran pendidikan terutama yang berkaitan dengan praktek diluar kampus selama 2 semester. Manfaat MBKM dapat dinikmati baik oleh siswa maupun guru/dosen. Kebijakan Kampus Merdeka bagi Perguruan Tinggi Ala Nadiem Makarim, yaitu: Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, Program re-akreditasi secara otomatis dan sukarela, Syarat menjadi PTN-BH dipermudah, Hak belajar selama tiga semester di luar program studi dan Perubahan definisi SKS.

Soal Latihan

MC

Berikut makna Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?

- Meningkatkan kualitas lulusan dan kompetensi capaian pembelajaran lulusan, baik soft skills maupun hard skills
- Membantu Mahasiswa untuk Mengeksplorasi di Luar Bidang Studinya.
- Melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- Menawarkan pendidikan yang lebih luas dan umum.
- mempersiapkan mahasiswa sebagai lulusan siap bekerja.

MC

Berikut makna dari tujuan kebijakan MBKM?

- Menyiapkan peserta didik yang bermoral
- Mewujudkan manusia yang berdaya saing; ini berarti bahwa manusia sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, produktif, bermatabat, produktif dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- Memberi pemahaman untuk dapat bertoleransi dan menghargai
- Menyiapkan jiwa sosial yang tinggi
- berorientasi pada akademik ketimbang praktik

MC

Berikut manfaat mahasiswa ikut program kampus Merdeka adalah?

- Mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendalami minat dan bakat selama menjalani pendidikan di Program Studi.
- Menawarkan pendidikan yang lebih luas dan umum
- Menawarkan pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu
- Tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan studi lanjut
- Melepas belenggu agar lebih mudah untuk bergerak.

MC

Terdapat Terdapat empat poin yang menjadi program utama Kebijakan Kampus Merdeka bagi Perguruan Tinggi kecuali?

- Tidak berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik.
- Adanya otonomi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta
- Program re-akreditasi secara otomatis dan sukarela
- Syarat menjadi PTN-BH dipermudah

- Hak belajar selama tiga semester di luar program studi dan Perubahan definisi SKS

MC

Berikut Permen RI No 3 Tahun 2020 pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah?

- Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi maupun di luar program studi
- Tidak fokus pada penguasaan hard skill untuk dunia kerja
- Berorientasi pada peningkatan pengetahuan bukan keterampilan
- Menyediakan kebutuhan perusahaan penyedia lapangan kerja
- Wajib memberikan hak bagi mahasiswa secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Nuraida Rahmah, dkk. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Abstrak. *Al Qalam*, 16(5), 1921–1928.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif) (E. Kuswandi (ed.)). CV Cendekia Press.
- Asdrayany, D., Najmi Muhajir, M., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. *Journal on Education*, 06(01), 6840–6852.
- A, Yandri. 2022. Pendidikan Karakter: Peranan Dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berkualitas. di <https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/pendidikan-karakter:-peranan-dalam-menciptakan-peserta-didik-yang-berkualitas> diakses pada tanggal 23 Mei 2024
- Bormasa, dkk. (2023). Birokrasi Indonesia (A. Yanto (ed.); Cetakan pe). PT Global Eksekutif Teknologi
- Daryanto, dkk. (2022). Model Manajemen Pelatihan Pendidikan Vokasi. In M. Arifin (Ed.), *Jurnal Aktualita* (Vol. 9, Issue 1). UMSU PRESS.
- Depdiknas .2006. Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas
- EducationFitrah: *Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Faturrahman, F., Setiawan, F., Astuti, W. D., & Khasanah, K. (2022). Analisis Kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter. *Tsaqofah*, 2(4), 466–474. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v2i4.469>
- Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendas Mahakam*, 3(2), 98–116.
- Hizam, dkk. (2022). Peran Kekuasaan dalam Pendidikan. *Society*, 13(1), 47–52. <https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5275>
- Irawan, A., & Suharyati, H. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Pada Perguruan Tinggi: Literatur Review. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 1116. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19419>

- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Anwarul*, 1(1), 121–136. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.51>
- Kampus Merdeka: kemdikbud.go.id (diakses pada 23 Mei 2024)
- Maulana, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi (Berdasarkan Survey SPADA di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022). *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.1-21>
- Mayya, M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 108–117. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19853>
- Muhammad. (2018). Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance). In B. Rahman, R. Kurniawan, & H. Iskandar (Eds.), Unimal Press (cetakan pe). Unimal Press.
- Mumtahanah, N., Aslamiyah, S. S., & Ahmad, V. I. (2023). Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) di Indosesia. *Akademika*, 17(2), 102–114. <https://doi.org/10.30736/adk.v17i2.1888>
- Namora, D., & Bakar, A. (2021). Perbincangan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Journal of Education*, 2(1), 101–114. <https://doi.org/10.54168/ahje.v2i1.36>
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Putry, R. (2018). Nilai Pendidikan Karakter Anak di Sekolah Perspektif Kemendiknas. *Gender Equality (International Journal of Child and Gender Studies)*, 4, 39–54. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- Puri, dkk. (2023). Pendidikan Vokasi dan Pengembalian Upah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 129–139. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.56689>
- Rahman, A., Yusdayanti, Nawir, M., & Quraisy, H.(2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 132(1), 46–53.
- Rizal, D. A., Zani, M. Z., & Thontowi, Z. S. (2023). Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Perspektif Pendidikan Humanis Religius. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 23–38. <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i1-2>
- Samsun, dkk. (2024). Studi Literatur Sikap Dosen Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV). 6(02). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2887>

- Siswanto, E., & dkk. 2021. Pengembangan Kebijakan Pendidikan, dalam Tinjauan Polkumeksosbud.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *FFitrah: Journal of Islamic*
- Sukoco, D. (2019). Pemahaman Pendidikan Vokasi Di Jenjang Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(01), 23–26.
- Suyana, dkk. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634.
- Undang-undang R.I, Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1, ayat 7.
- Verawadina, dkk. (2019). Kurikulum Pendidikan Vokasi pada Era Revolusi Industri 4. *Jurnal Pendidikan*, 20, 82–90.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>

Glosarium

A

Administrator: khusus pada konteks kebijakan pendidikan, administrator mempunyai makna sebagai individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan pendidikan pada suatu sistem pendidikan. Berikut ada beberapa makna dan peran utama dari administrator dalam kebijakan Pendidikan antara lain: Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Evaluasi, Pengembangan Profesional. Jadi dapat dimaknai bahwa administrator dalam kebijakan Pendidikan kuncinya dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dibuat, akan tetapi juga diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

B

Birokrasi: Birokrasi khusus dalam kebijakan pendidikan mengacu pada sebuah sistem dan struktur organisasi formal yang mengatur, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Birokrasi selalu melibatkan berbagai lembaga, departemen, dan individu yang bekerja sesuai dengan aturan, prosedur, serta hierarki tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan

Body Of Knowledge: Merupakan "Badan Pengetahuan" adalah kumpulan lengkap terdiri dari konsep, istilah, serta aktivitas yang membentuk domain profesional atau disiplin tertentu. Hal ini merupakan fondasi dari keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpraktik dalam bidang tertentu

D

Domestifikasi: adalah proses di mana manusia dapat memodifikasi dan menjinakkan hewan liar dan tumbuhan liar sehingga menjadi lebih bermanfaat atau mampu hidup berdampingan dengan makhluk yang namanya manusia. Proses ini secara umum melibatkan seleksi dan pembiakan spesies tertentu agar dapat menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia, seperti ukuran, temperamen, dan hasil produksi. Domestikasi adalah kunci dalam perkembangan peradaban manusia, sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat menetap, bercocok tanam, dan membangun komunitas yang stabil dan aman.

E

Ekonomi: adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang secara tidak terbatas. Ekonomi juga mempelajari tentang bagaimana keputusan ekonomi yang dibuat oleh para aktor, termasuk individu, rumah tangga, pemerintah, perusahaan serta dampaknya terhadap distribusi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. secara prakteknya, ekonomi digunakan untuk memformulasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Eksekutif: yaitu merujuk pada suatu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan serta tanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. ada beberapa makna penting yang terkait dengan peran eksekutif dalam kebijakan Pendidikan seperti; Pengambilan Keputusan, Implementasi Kebijakan. Akan tetapi secara keseluruhan, peran eksekutif dalam kebijakan pendidikan adalah memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas, relevan, serta mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat secara keseluruhan

Estimasi: merupakan suatu proses atau teknik untuk memperkirakan nilai, ukuran, serta jumlah pada suatu variabel yang didasarkan pada informasi yang tersedia. Istilah ini sangat sering digunakan di berbagai bidang, antara lain bidang ilmu pengetahuan, teknik, ekonomi, dan bisnis. Estimasi juga dapat membantu pada saat pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya.

Evaluasi: merupakan proses secara sistematis dalam upaya mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi tentang suatu kebijakan, program, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya. Dalam konteks pendidikan, evaluasi bertujuan untuk Menilai Pembelajaran, Meningkatkan Kualitas, Pengambilan Keputusan dan lainnya. Kemudian Evaluasi juga dapat dilakukan dalam berbagai metode, seperti tes, observasi, wawancara, dan survei, serta dapat bersifat formatif atau sumatif. Evaluasi juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisiensi.

F

Formulasi kebijakan pendidikan: suatu proses melibatkan identifikasi, perumusan, dan penetapan kebijakan yang ada kaitannya dengan sistem pendidikan disuatu negara atau daerah. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tujuan pembangunan yang lebih luas. Berikut aspek penting dari formulasi kebijakan Pendidikan antara lain; Analisis Kebutuhan, Pengembangan Strategi, Keterlibatan Pemangku Kepentingan serta Evaluasi dan Revisi

G

Game Stage: khusus dalam konteks kebijakan pendidikan dapat makna sebagai suatu fase atau tahap di mana berbagai pemangku kepentingan dalam Pendidikan seperti pemerintah, pendidik, siswa, serta Masyarakat dapat berinteraksi dan berkompetisi dalam Upaya untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan. beberapa poin penting terkait dengan "Game Stage" dalam kebijakan Pendidikan, yaitu; Interaksi Antarpemangku Kepentingan, Perubahan Kebijakan, Dinamika Kekuasaan serta Evaluasi dan Umpun Balik.

I

Integrasi Sosial: merupakan suatu proses di mana kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas masyarakat berusaha untuk mencapai keserasian dan kesatuan sosial. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti kesempatan yang sama, kesetaraan hak terhadap penerimaan perbedaan yang ada. Integrasi sosial bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat dengan mengurangi konflik serta ketegangan diantara kelompok yang berbeda. Contohnya adalah program-program yang mempromosikan dialog antar budaya, pendidikan inklusif, kebijakan anti-diskriminasi, serta kegiatan komunitas yang melibatkan dari berbagai kelompok masyarakat. Kesimpulannya adalah integrasi sosial adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan harmonis.

Implementasi Kebijakan: dapat merujuk pada suatu proses dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan serta disahkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dan dilaksanakan di lapangan. Proses ini biasanya mencakup dari berbagai langkah, dimulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai pada mengevaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai sesuai tujuan yang diinginkan. Kemudian Implementasi kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk

memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menjadi dokumen, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif di masyarakat.

Inisiasi: adalah proses atau tindakan untuk memulai sesuatu, hal ini berkaitan erat dengan peralihan atau pengenalan ke dalam suatu kelompok, tradisi, atau pengalaman baru. Dalam konteks sosial, inisiasi sering melibatkan upacara atau ritual yang menandai transisi seseorang dari satu tahap kehidupan ke tahap lainnya, seperti dari masa remaja ke masa dewasa.

Institusionalisme: adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada peran lembaga (institusi) untuk membentuk perilaku individu dan kelompok. Pendekatan ini dapat juga diterapkan pada berbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, serta sosiologi. Ada beberapa makna kunci dari istilah institusionalisme: Analisis Kebijakan, Stabilitas dan Perubahan, serta Peran Institusi.

Investasi Pendidikan: Hal ini menekankan pada pengeluaran sumber daya, baik finansial maupun waktu, dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Ada beberapa makna penting dari investasi Pendidikan seperti; Peningkatan Kualitas SDM, Pertumbuhan Ekonomi, Inovasi dan Kreativitas, serta Pengembangan Karakter.

K

Kebijakan Pendidikan Inklusi: merupakan serangkaian pedoman, aturan, dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak - anak, terutama anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, memiliki akses yang setara dan adil terhadap pendidikan yang berkualitas. Tujuan Kebijakan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, semua siswa, tanpa memandang kemampuan fisik, mental, sosial, atau emosional mereka, dapat ikut berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan persekolahanK

Kebijakan Makro: merupakan rangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas dalam mengarahkan serta mengatur sistem pendidikan pada tingkat nasional atau regional. Ada beberapa aspek penting dalam sistem pendidikan, termasuk pendanaan, kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas

pendidikan. Kebijakan makro mempunyai tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional. Kebijakan dibentuk melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, serta berdasarkan analisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah.

Kebijakan Messo: adalah sebuah kebijakan yang berada di tingkat menengah antara kebijakan makro (nasional) dengan kebijakan mikro (lokal atau individu). Kebijakan Messo ini biasanya dikeluarkan oleh institusi atau organisasi pendidikan tertentu, seperti dinas pendidikan daerah, yayasan pendidikan, atau lembaga pendidikan tinggi. Ada beberapa karakteristik kebijakan Messo dalam pendidikan: Cakupan Wilayah: dimana kebijakan biasanya diterapkan pada wilayah tertentu, seperti provinsi, kota, atau kabupaten, serta tidak berskala nasional, Spesifik pada Kebutuhan: Kebijakan yang dirancang untuk menangani kebutuhan dan masalah spesifik dan mungkin tidak terinklud dengan kebijakan nasional. contohnya, peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil atau pengembangan kurikulum local, serta Implementasi Kebijakan Nasional.

Kebijakan Mikro Pendidikan: adalah serangkaian tindakan, pedoman, dan keputusan yang diambil di tingkat lokal atau institusional yang tujuannya untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Kebijakan berfokus pada aspek-aspek spesifik dari operasi sehari-hari lembaga pendidikan, contohnya berupa metode pengajaran, kurikulum, manajemen kelas, alokasi sumber daya, dan penilaian. Berikut Contoh kebijakan mikro pendidikan yaitu Pengembangan dan penerapan kurikulum khusus di sekolah, Program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru, Strategi manajemen kelas yang efektif, Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, Pendekatan terhadap penilaian dan evaluasi siswa. Kemudian kebijakan mikro pendidikan biasanya ditetapkan oleh administrator sekolah, kepala sekolah, atau departemen pendidikan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar siswa yang dilayani, serta mempunyai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Kebijakan Pendidikan Vokasional adalah serangkaian pedoman, aturan, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis dan profesional peserta didik. Kebijakan vokasional bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja dengan menyediakan bentuk-bentuk pelatihan yang relevan, meningkatkan keterampilan teknis, serta memenuhi kebutuhan pasar lapangan tenaga kerja. Cakupan ini terdiri dari beberapa aspek antara lain: Kurikulum: Penentuan materi ajar yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan keterampilan, Pelatihan dan Magang: Penyediaan pengalaman praktik di lapangan melalui kerja sama dengan perusahaan dan industri, Peningkatan Kualitas Pengajar, Aksesibilitas, Pengembangan Kemitraan. Dengan adanya kebijakan ini, maka harapan pendidikan vokasional dapat menghasilkan lulusan yang siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan pasar kerja

L

Legislatif: adalah peran dan fungsi lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, dalam merumuskan, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan pendidikan. Adapun peran legislatif dalam konteks Pendidikan: Penyusunan Kebijakan, Pengawasan dan Akuntabilitas, Representasi Masyarakat, Penganggaran, Pemberdayaan Pendidikan. Kesimpulannya, legislatif memainkan peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di suatu negara, serta memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat.

M

MBKM: Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, adalah suatu inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas pada mahasiswa dalam Upaya pengembangan diri serta belajar di luar lingkungan kampus tradisional. Jadi, MBKM merupakan langkah penting dalam mengubah paradigma pendidikan tinggi khususnya di Indonesia, menjadikannya lebih relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan Masyarakat secara umum.

O

Otonomi Pendidikan: merupakan konsep suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, diberikan kebebasan serta kemandirian untuk menentukan kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan. Otonomi pendidikan mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan memberikan fleksibilitas kepada seluruh institusi pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal dan konteks spesifik sekolah tersebut.

P

Patologi: adalah berbagai masalah dan hambatan yang mengganggu efektivitas sistem pendidikan. Patologi ini mencakup serangkaian fenomena negatif yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa bentuk patologi dalam kebijakan pendidikan seperti: Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran, Birokrasi yang Berbelit-belit, Kesenjangan Akses Pendidikan, Kualitas Guru yang Tidak Memadai, Orientasi pada Nilai Ujian. Sehingga mengidentifikasi dan mengatasi patologi ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, serta dipastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan Karakter: Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada diri individu, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Pendidikan karakter ini tidak hanya mengajarkan pada pengetahuan akademis semata, tetapi juga menekankan pada pentingnya pembentukan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik. Tujuan utamanya adalah upaya membantu individu dalam mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, bertindak dengan integritas, dan berkontribusi positif terhadap Masyarakat secara luas.

Play Stage: Adalah merupakan tahapan pada perkembangan anak yang ditandai dengan bermain sebagai aktivitas utamanya. Fase ini anak-anak mulai memahami serta meniru peran-peran sosial melalui permainan. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog yang bernama George

Herbert Mead, yang terfokus pada pentingnya interaksi sosial anak dalam pembentukan identitas dan keterampilan sosial anak tersebut.

Politik: adalah suatu proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan Keputusan atau kebijakan dalam kelompok atau komunitas termasuk komunitas pendidikan, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya. Politik juga melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan konflik, serta dapat mengelola hubungan kekuasaan. Jadi secara keseluruhan, politik itu merupakan mekanisme penting dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama melalui berbagai cara atau strategi dan sarana yang ada.

Preparatory Stage: Hal ini merujuk pada fase awal dalam proses pengembangan dan pengimplementasian kebijakan pendidikan. Di tahap ini, fokus utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. beberapa poin kunci terkait pada tahap persiapan ini adalah: Analisis Kebutuhan, Penetapan Tujuan, Perancangan Kebijakan dan lain-lain.

Public Policy: merupakan serangkaian tindakan yang diambil secara utuh oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya dalam rangka mengatasi masalah atau kebutuhan tertentu pada masyarakat. mencakup bidang dari kebijakan publik ini antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. Contoh dari kebijakan publik adalah program vaksinasi nasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, undang-undang dibidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, serta regulasi lingkungan untuk mengurangi polusi dan melindungi sumber daya alam lainnya.

S

Stupidifikasi: "Stupidifikasi" atau "stupidification" istilah dalam bahasa Inggris yang artinya menggambarkan proses di mana individu atau kelompok menjadi lebih bodoh atau kurang kritis dalam berpikir, ini salah satu akibat dari paparan informasi yang salah, minimnya pendidikan, atau manipulasi media. Istilah ini biasa digunakan dalam konteks kritik sosial, politik, atau budaya untuk menggambarkan bagaimana sistem atau institusi tertentu bisa berkontribusi pada penurunan kualitas pemikiran kritis dan kecerdasan Masyarakat. Istilah ini sering juga digunakan oleh para kritikus sosial dalam menyoroti masalah pada sistem pendidikan, media, dan

budaya yang dapat menghambat perkembangan intelektual individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Sosial: memiliki makna yang sangat luas dan penting, cakupannya terdiri dari berbagai aspek yang berhubungan dengan interaksi manusia, perkembangan masyarakat, dan peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun secara keseluruhan, makna sosial dalam kebijakan pendidikan berhubungan erat dengan suatu usaha dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan mendukung pengembangan holistik individu serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sustainability Pendidikan: adalah mengacu pada suatu konsep dan praktik pendidikan yang fokus pada keberlanjutan dalam jangka panjang. Lingkup capaiannya adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat saja akan tetapi mampu juga mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat tersebut.

T

Terminasi: Merupakan suatu proses penghentian atau pengakhiran suatu kegiatan atau program, yang bisa merujuk pada berbagai konteks seperti bisnis, kontrak, proyek, atau hubungan kerja lainnya. Istilah bisnis, terminasi sering digunakan untuk merujuk pada berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, ini terjadi karena berbagai penyebab, seperti kinerja yang buruk, pengurangan tenaga kerja, atau kesepakatan bersama. Akan tetapi secara umum, terminasi bisa juga mencakup pengakhiran suatu proses, layanan, atau sistem, yang sering kali melibatkan evaluasi untuk menentukan alasan di balik penghentian tersebut dan dampaknya bagi pihak-pihak yang terlibat.

